

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN LIMU POLITIK**

**EVALUASI KINERJA SEKSI REKAYASA DAN FASILITAS LALU
LINTAS JALAN DAN PERAIRAN DALAM PELAKSANAAN
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN RAMBU LALU LINTAS
(TRAFFIC LIGHT) DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Anggi

NPM : 147310654

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2018**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Anggi
NPM : 147310654
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Seksi Rekayasa dan Fasilitas
Lalu Lintas Jalan Dan Perairan Dalam
Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Rambu
Lalu Lintas (Traffic Light) di Dinas Perhubungan
Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 11 Januari 2019

Pembimbing I,



Dra. Hj. Monalisa, M.Si

Pembimbing II,



Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



Budi Mulianto, S.IP, M,Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

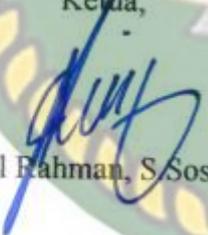
Nama : Anggi
NPM : 147310654
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Seksi Rekayasa dan Fasilitas
Lalu Lintas Jalan Dan Perairan Dalam
Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Rambu
Lalu Lintas (Traffic Light) di Dinas Perhubungan
Kota Pekanbaru.

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh Karena itu Tim penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

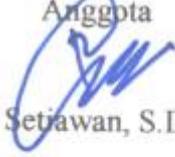
Pekanbaru, 18 Februari 2019

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Khairul Fahman, S.Sos.,M.Si


Dita Fisdian Adni S.IP.,M.IP
Anggota


Rizky Setiawan, S.IP.,M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I


H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 18/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Anggi
N P M : 147310654
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Seksi Rekayasa Dan Fasilitas Lalulintas Jalan Dan Perairan Dalam Pelaksanaan Pemeliharaan Dan Perawatan Rambu Lalulintas (Traffic Light) Di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

1. Dr. Khairul Rahman, M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Dita Fisdian Adhi, S.IP., M.IP	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Dra. Hj. Monalisa, M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. Rizky Setiawan, S.IP., M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
6. Rijalul Fikri, S.Sos., M.Si	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Januari 2019
An. Dekan

H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----sk penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

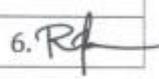
=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor : 18 /UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 30 Januari 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Senin tanggal 31 Januari 2019 jam 08.00 - 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Anggi
NPM : 147310654
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalann dan Perairan dalam Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas (Traffic Light) di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru"

Nilai Ujian : Angka "76 " Huruf "B+"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus /Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Khairul Rahman, M.Si	Ketua	1. 
2.	Dita Fisdian Adni. S.IP., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si	Anggota	3.
4.	Dra. Hj. Monalisa, M.Si	Anggota	4.
5.	Rizky Setiawan, S.IP, M.Si	Anggota	5. 
6.	Rijalul Fikri, S.Sos., M.A	Notulen	6. 

Pekanbaru, 31 Januari 2019
An. Dekan,


H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Anggi
NPM : 147310654
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Seksi Rekayasa dan Fasilitas
Lalu Lintas Jalan Dan Perairan Dalam
Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Rambu
Lalu Lintas (Traffic Light) di Dinas Perhubungan
Kota Pekanbaru.

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh Karena itu Tim penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 18 Februari 2019

An.Tim penguji
Sekretaris

Ketua,

Dr. Khairul Rahman, S.Sos.,M.Si

Dita Fisdian Adni S.IP.,M.IP

Turut Menyetujui

Wakil Dekan 1,

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

H. Panca Setyo Prihatin, S.IP.,M.Si

Budi Mulianto, S.IP.,M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Evaluasi Kinerja Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Dan Perairan Dalam Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas (Traffic Light) di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru ”. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan.
2. Dr. H. Moris Adidi Yogja, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Budi Mulianto, S.IP., M.Si Sebagai Ketua Program studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
4. Dra. Hj. Monalisa., M.Si Sebagai Pembimbing I saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
5. Rizky Setiawan, S.IP., M.Si Sebagai Pembimbing II saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisa Skripsi ini.
6. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
7. Kepada keluarga tercinta Ayah saya dan juga kepada Ibu saya tercinta dan juga kepada saudara-saudara saya tercinta yang senantiasa pengertian dan juga kesabarannya selalu mendoakan saya, memberikan inspirasi dan juga semangat serta bantuan untuk penyelesaian penulisan Skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan saya di Prodi Ilmu Pemerintahan yang juga telah banyak membantu saya untuk berkembang di dalam memahami ilmu-ilmu yang sedang dipelajari, khususnya Ilmu Pemerintahan.
9. Kepada seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Dalam naskah Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Skripsi ini untuk

kesempurnaan Skripsi ini penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan Skripsi adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

Wassalammualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 16 Desember 2018

Penulis

Anggi



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	21
1. Tujuan.....	21
2. Kegunaan.....	22
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	23
1. Konsep Pemerintahan.....	23
2. Konsep Organisasi Pemerintahan	26
3. Konsep Manajemen Pemerintahan.....	29
3.1 Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia.....	31
3.2 Konsep Manajemen Pelayanan Publik.....	34
4. Konsep Evaluasi.....	35
5. Konsep Kinerja.....	44
5.1 Manfaat Penilaian Kerja.....	48
5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja.....	50
6. Konsep Kinerja Organisasi Pemerintah	52
7. Konsep Rambu Lalu Lintas.....	55
B. Penelitian Terdahulu	57
C. Kerangka Pikir	59
D. Hipotesis.....	60
E. Konsep Operasional	61
F. Operasional Variabel.....	64
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	65
B. Lokasi Penelitian.....	65
C. Informan dan Key Informan.....	66

D. Jenis dan Sumber Data.....	67
E. Teknik Pengumpulan Data.....	68
F. Teknik Analisis Data.....	69
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	70
H. Rencana Sistematis Laporan Penelitian	71
BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	72
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	72
1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru.....	72
B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	76
C. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	79
1. Tugas Kepala Dinas.....	80
2. Tugas Sekretaris Dinas.....	81
3. Tugas Kepala Sub Bagian Umum.....	82
4. Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan.....	83
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	85
A. Identitas Narasumber.....	85
B. Hasil Penelitian Evaluasi Kinerja Seksi Rekayasa Dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Dan Perairan Dalam Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas (<i>Traffic Light</i>) Di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	88
1. Efektivitas.....	88
a. Hasil wawancara Mengenai Pembentukan Tim Kerja dan Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Personil.....	90
2. Efisiensi.....	92
a. Hasil wawancara mengenai Penyusunan Program Kerja dan juga ketersediaan anggaran.....	92
3. Kecukupan.....	94
a. Hasil wawancara mengenai Pelaksanaan Pengawasan dan juga Pelaksanaan Perawatan Traffic Light.....	95
4. Pemerataan.....	96
a. Hasil wawancara mengenai Pelaksanaan Perbaikan dan Penggantian Unit Traffic Light yang rusak.....	96
5. Responsivitas.....	99
a. Hasil wawancara mengenai memberikan respon cepat dan juga memberikan tempat pengaduan bagi masyarakat.....	99
6. Ketepatan.....	102
a. Hasil wawancara mengenai kelengkapan sarana dan prasarana dan juga penyediaan personil pengawas dilapangan..	102
C. Hasil Penelitian Dalam Wawancara Mengenai Evaluasi Kinerja Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan Dalam Pelaksa	

Naan Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas (Traffic Light) Di Kota Pekanbaru.....	104
D. Hambatan-Hambatan.....	105

BAB VI PENUTUP..... 107

A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108

DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 109



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Jumlah Rambu-Rambu Isyarat Lampu Lalu Lintas (<i>Traffic Light</i>) yang ada di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2016-2017	16
II.1 : Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Pengoperasian Rambu Lalu Lintas (<i>Traffic Light</i>) Di Kota Pekanbaru	61
III.1 : Tabel Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Pengoperasian Rambu Lalu Lintas (<i>Traffic Light</i>) Di Kota Pekanbaru	66
III.2 : Perincian jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Pengoperasian Rambu Lalu Lintas (<i>Traffic Light</i>) Di Kota Pekanbaru	70
IV.1 : Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau dari Kecamatan Berdasarkan Jumlah penduduk dan juga presentase	74
IV.2 : Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan Kecamatan, Luas, Presentase	75
IV.3 : Jumlah agama resmi dan penganutnya Di daerah Kota Pekanbaru	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
II.I : Kerangka Pikir Terkait Dengan Penelitian Tentang Evaluasi Kinerja Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Dan Perairan Dalam Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas (Traffic Light) di Kota Pekanbaru	60
IV.1 : Gambar Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	84



PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggi
NPM : 147310654
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Dan Perairan Dalam Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas (Traffic Light) di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Februari 2019
Pelaku Pernyataan,


Anggi

EVALUASI KINERJA SEKSI REKAYASA DAN FASILITAS LALU LINTAS JALAN DAN PERAIRAN DALAM PELAKSANAAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN RAMBU LALU LINTAS (TRAFFIC LIGHT) DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

OLEH : Anggi

Kata Kunci : Evaluasi, Kinerja, Traffic Light.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Kinerja Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan Dalam Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas (*Traffic Light*) Di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Evaluasi yang dikemukakan oleh William N Dunn (2003:610) meliputi ; Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan. Tipe penelitian ini adalah tipe kualitatif, dan lokasi penelitiannya yaitu di Di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Ada 9 orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini dan untuk mengumpulkan dan mencari data peneliti menggunakan wawancara dalam penelitian ini, setelah data-data dikumpulkan dan akan dianalisa secara deskriptif, guna mendapatkan jawaban tentang Evaluasi Kinerja Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan. Setelah dilakukan penelitian dan Wawancara mendalam, adapun hasil dari penelitian tentang Evaluasi Kinerja Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan Dalam Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas (*Traffic Light*) Di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah “Cukup Baik”, dengan beberapa hambatan seperti masalah Traffic Light yang Rusak atau mati Penggantiannya memerlukan waktu yang cukup lama, dan harus menunggu dari Pusat untuk mengganti Traffic Light yang baru, juga dikarenakan Traffic Light yang mati akan menimbulkan kemacetan di setiap persimpangan jalan seperti di hari kerja dan di hari libur, dan juga kurang maksimalnya Pemeliharaan dan Perawatan yang dilakukan Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas mengenai perawatan dan pemeliharaan traffic Light.

EVALUATION OF ENGINEERING AND FACILITY SELECTION OF ROAD TRAFFIC AND WATER IN IMPLEMENTATION OF TRAFFIC LIGHT IN THE PEKANBARU CITY RELATIONSHIP

ABSTRACT

BY: Anggi

Keywords: Evaluation, Performance, Traffic Light.

This study aims to determine the Performance Evaluation of Engineering and Facilities of Road and Water Traffic Facilities in the Implementation of Maintenance and Maintenance of Traffic Light at the Transportation Service of Pekanbaru City. The theory used in this study is the Evaluation theory proposed by William N Dunn (2003: 610) including; Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness and Accuracy. This type of research is a qualitative type, and the location of the research is in the Office of Transportation Department of Pekanbaru City. There were 9 people who were used as informants in this study and to collect and search data researchers used interviews in this study, after the data were collected and will be analyzed descriptively, in order to get answers about the Performance Evaluation of Engineering and Road and Water Traffic Facilities. After conducting research and in-depth interviews, the results of the research on the Performance Evaluation of the Engineering and Facilities of Road and Water Traffic Facilities in the Implementation of Maintenance and Maintenance of Traffic Light at the Transportation Agency of Pekanbaru City are "Good Enough", with some obstacles such as the problem of Traffic Light that is Damaged or dead The replacement takes a long time, and has to wait from the Center to replace the new Traffic Light, also because the Traffic Light that is dead will cause congestion at every intersection such as on weekdays and on holidays, and also the maximum maintenance and maintenance carried out by the Engineering Section and Traffic Facilities regarding the maintenance and maintenance of Light traffic.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang di bentuk berdasarkan semangat kebangsaan bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara republik Indonesia adalah negara kesatuan yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga mampu mewujudkan sasaran pembangunan baik di pusat maupun di daerah yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dibaginya wilayah Negara Republik Indonesia ke dalam wilayah besar dan kecil sebagaimana yang terdapat dalam pasal 18 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 adalah untuk mengefektifkan jalannya roda pemerintahan. Guna menindaklanjuti maksud tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan untuk menata wilayah dan pemerintahan. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang terakhir tentang Peraturan Wilayah Pemerintahan tersebut adalah Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa: Pemerintahan Pusat adalah Presiden

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara republik Indonesia yang dibantu wakil Presiden dan menteri sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sedangkan yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Dibentuknya pemerintah daerah sendiri bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan dan pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Pada pasal 2 (dua) berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekuasaan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Kemudian yang dimaksud dengan pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga

negara asing atau siapa saja pada suatu saat berada secara sah (*legal*) diwilayah Indonesia wajib melayankanya (Ndraha, 2003;7.)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di katakana bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pembahasan mengenai pemerintahan Daerah tidak lepas dari ruang lingkup Dekonsentrasi, dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Dekonsentrasi adalah Pelimpahan sebagai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi Vertikal di Wilayah tertentu dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum. Dan instansi Vertikal dapat di artikan sebagai perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintah yang tidak diserahkan kepada Daerah Otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

Daerah Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan di Indonesia. Tapi seringkali, selalu ada masalah antara pusat dan daerah, salah satunya dalam hal pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Ketika kita membahas urusan pemerintahan pusat dan daerah, peraturan yang bisa menjadi pegangan bagi kita adalah Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Urusan pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar ini terbagi menjadi 3 bagian, pertama Urusan pemerintahan absolut, kedua, urusan pemerintahan konkuren dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum. Ketiga urusan diatas dibagi menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah. Asas yang digunakan pembagian urusan pemerintahan terdiri dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas pembantuan.

Jadi secara sederhananya, pembagian urusan pemerintahan menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terbagi menjadi 3 bagian. Pertama urusan pemerintahan absolut, ini adalah urusan yang sepenuhnya berada ditangan pemerintah pusat, tapi pemerintah pusat bisa melimpahkan pelaksanaannya kepada daerah sesuai dengan asas dekonsentrasi. Kedua, adalah urusan pemerintahan konkuren, pengertiannya adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah. Ketiga adalah urusan pemerintahan umum, ini adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Pelaksanaannya bisa diserahkan kepada gubernur atau bupati di daerahnya masing-masing.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu: Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (service), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

1. Fungsi Primer

Fungsi Primer merupakan fungsi pemerintah yang berjalan terus-menerus dan memiliki hubungan positif dengan kondisi masyarakat yang diperintah. Maksudnya adalah fungsi primer dijalankan secara konsisten oleh pemerintah, tidak terpengaruh oleh kondisi apapun, tidak berkurang dan justru semakin meningkat jika kondisi

masyarakat yang diperintah meningkat. Fungsi primer dibedakan menjadi dua:

a. Fungsi Pelayanan

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia.

b. Fungsi Pengaturan

Pemerintah memiliki fungsi pengaturan(regulating) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. Maksud dari fungsi ini adalah agar stabilitas negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan.

2. Fungsi Sekunder

Fungsi sekunder merupakan fungsi yang berbanding terbalik dengan kondisi dan situasi di masyarakat.Maksudnya adalah semakin tinggi taraf hidup masyarakat, maka semakin tinggi bargaining position, tetapi semakin integratif yang diperintah, maka fungsi sekunder pemerintah berkurang atau turun. Fungsi sekunder dibedakan menjadi:

a. Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara-negara terbelakang dan berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar daripada negara maju.

b. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skill dan kemampuan untuk bisa keluar dari comfort zone atau zona aman. Contohnya masyarakat bodoh, miskin, tertindas, dan dll. Pemerintah wajib mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Ketergantungan terhadap pemerintah akan semakin berkurang dengan pemberdayaan masyarakat. Sehingga hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan Negara dan fungsi ini pulalah yang akan menjadi dasar penulis untuk memperdalam pembahasan mengenai pemberdayaan pada penelitian ini.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan

lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi didalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilakukan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senjatanya telah ada dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi daerah bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya, adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk pemberdayaan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian dari tujuan nasional yang telah ditetapkan.

Jalan raya merupakan sarana transportasi darat yang membentuk jaringan transportasi untuk menghubungkan daerah-daerah, sehingga roda perekonomian dan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Seiring dengan bertambahnya kepemilikan kendaraan, serta kemajuan dibidang industri dan perdagangan, serta distribusi barang dan jasa menyebabkan meningkatnya volume lalu lintas. Terkadang peningkatan volume lalu lintas ini tidak diikuti dengan peningkatan jalan yang ada. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan jalan

yang berakibat tersendatnya arus lalu-lintas, bahkan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hal lain yang menyebabkan tersendatnya arus lalu lintas adalah tidak terawatnya rambu-rambu lalu lintas seperti lampu lalu lintas (*Traffic Light*) yang telah disediakan, tentu hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah atau dinas terkait yang menangani bidang lalu lintas yaitu Dinas Perhubungan kota Pekanbaru.

Perkembangan arus lalu lintas di kota Pekanbaru saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, meliputi perkembangan di bidang Wisata, Ekonomi, Industri, dan Distribusi yang termasuk dalam jalur lintas antar provinsi yang pusat tujuannya adalah kota pekanbaru, dengan pesatnya perkembangan yang terjadi, maka secara langsung juga berdampak terhadap pertumbuhan terhadap transportasi yang digunakan masyarakat. Dan sayangnya perkembangan pertumbuhan kendaraan bermotor yang ada di kota pekanbaru tidak didukung dengan system yang dapat mengatasi kemacetan yang diakibatkan bertumpuknya kendaraan.

Kemacetan adalah situasi atau keadaan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar terutama yang tidak memiliki sarana transportasi publik dan juga rambu-rambu lalu lintas dengan baik atau memadai ataupun juga tidak seimbangny kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk. Jaringan jalan memiliki fungsi yang sangat penting yaitu sebagai prasarana untuk memindahkan/transportasi orang dan barang, dan merupakan urat nadi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan stabilitas nasional, serta

upaya pemerataan dan penyebaran pembangunan. Dalam dimensi yang lebih luas, jaringan jalan mempunyai peranan yang besar dalam pengembangan suatu wilayah, baik wilayah secara nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dari jaringan jalan tersebut selain daripada jaringan jalan, hal lain yang dapat mencegah terjadinya kemacetan adalah rambu-rambu lalu lintas yang disediakan, salah satunya adalah keberadaan Lampu Lalu Lintas (Traffic Light).

Masalah kemacetan menjadi bagian dari beragam permasalahan kota yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Terjadinya kemacetan lalu lintas di Kota Pekanbaru merupakan salah satu permasalahan penting yang harus diatasi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, terutama terjadinya kepadatan pada jalan-jalan utama pada kawasan-kawasan pusat kota, dan kepadatan terjadi sering kali dalam situasi jam-jam sibuk.

Untuk menanggulangi masalah ini seharusnya pemerintah daerah kota Pekanbaru khususnya Dinas Perhubungan kota Pekanbaru dapat memaksimalkan kinerja yang mana nantinya akan mengurangi permasalahan kemacetan yang terjadi di kota Pekanbaru. Bila memperhatikan peraturan kota Pekanbaru nomor 2 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kota Pekanbaru dan juga visi Dinas Perhubungan kota Pekanbaru yaitu: “Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Pos dan Telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau.”

Visi tersebut mempunyai makna Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya mempertahankan pelayanan yang sudah diberikan, juga akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus dan

berkesinambungan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kota disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan, serta selalu berkoordinasi dengan dinas - instansi terkait dalam mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan aspirasi pemerintah kota Pekanbaru.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru, maka Visi tersebut dijabarkan menjadi beberapa buah Misi yang diemban yaitu :

1. Meningkatkan dan memberdayakan Sumber Daya Manusia (*SDM*) Dinas Perhubungan Komunikai dan Informatika yang berkualitas dan profesional;
2. Memperbaiki, mempertahankan meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan;
3. Mengusahakan ketersediaan atau kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, sistem jaringan transportasi;
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

Di dalam menjalankan tugas nya, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memiliki Tugas dan Fungsi sebagai acuan dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan, berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, adapun Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah melaksanakan sebaaian urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas

otonomi dan pembantuan. Dan untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang perhubungan.
- b. Penyelenggaraan sebagai urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional di bidang perhubungan yang meliputi lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional.
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. (Sumber : Kantor Dishub Kota Pekanbaru 2018)

Adapun bidang yang lebih berwenang dalam menjalankan perintah yang diberikan oleh kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, yang di tangani oleh Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan perairan. Dan dapun tugas dan fungsi dari Seksi Pengawasan Lalu Lintas Jalan adalah sebagai berikut:

1. Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu lintas Jalan dan perairan mempunyai tugas membantu kepala bidang manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dalam melaksanakan sub urusan rekayasa dan fasilitasi lalu lintas jalan dan perairan.
2. Seksi Rekayasa dan fasilitas lalu lintas jalan dan perairan dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi nya sebagai berikut:

- a. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut di tempat kerja yang mudah di ambil atau mudah di gunakan.
- b. rumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang.
- c. Perumusan dan pelaksanaan evaluasi palaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang di capai dan kegiatan yang di laksanakan telah sesuai rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas.
- d. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepada bidang dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis, dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Pelaksanaan dan pengoordinasian rekayasa lalu lintas pada event-event tertentu (insidental)
- f. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan traffic light, rambu jalan, RPPJ, kanstin, marka jalan, papan nama jalan, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung dan perlengkapan jalan dan perairan.
- g. Perencanaan dan mengevaluasi geometric jalan, U-Turn dan mulut persimpangan.

- h. Pelaksanaan evaluasi dan perubahan waktu siklus persimpangan.
- i. Pelaksanaan evaluasi daerah rawan kemacetan.
- j. Penentuan lokasi, potensi, perhitungan tariff, larangan dan mengevaluasi parker untuk umum di badan jalan dan kebutuhan lalu lintas lainnya.
- k. Penyelenggaraan, merancang dan mengevaluasi kawasan tertib berlalu lintas.
- l. Penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi.
- m. Perumusan, pelaksanaan dan menghimpun peraturan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan seksinya.
- n. Pelaksanaan tugas yang di berikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (*Sumber: Resntra Dishub Kota Pekanbaru 2018*)

Selanjutnya bidang yang di berikan wewenang untuk melakukan control terhadap Traffic Light di Kota Pekanbaru adalah Seksi Pengawasan Lalu Lintas Jalan, dan adapun Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pengawasan Lalu Lintas jalan dan Perairan Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Seksi pengawasan lalu lintas jalan mempunyai tugas membantu kepala bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam melaksanakan sub urusan urusan pengawasan lalu lintas jalan.
2. Seksi pengawasan lalu lintas jalan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan,

menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut di tempat kerja yang mudah diambil atau mudah digunakan.

b. perumusan dan pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang.

c. perumusan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dengan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas.

d. perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.

e. pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan.

f. pelaksanaan penyidikan pelanggaran di bidang LLAJ.

g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dalam kota.

h. pelaksanaan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya.

i. pelaksanaan pengawasan dan penertiban, pengendalian dan pengamanan lalu lintas di ruas-ruas persimpangan jalan dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota.

j. pelaksanaan pengawasan dan penertiban, pengendalian dan pengamanan lalu lintas pada kawasan tertib berlalu lintas.

k. pengelolaan dan pelaksanaan penderekan kendaraan kendaraan bermotor.

i. pelaksanaan pemanduan kendaraan.

m. penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi

n. perumusan, pelaksanaan dan menghimpun peraturan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan sesksinya.

o. pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sementara itu disisi lain mengenai Rambu Lalu Lintas (*traffic light*) di kota Pekanbaru, Pemerintah sudah memberikan anggaran rutin setiap tahunnya untuk perbaikan, perawatan, pengoperasian dan juga pengawasan agar Rambu Lalu Lintas (*traffic light*) dapat berfungsi dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat disaat berkendara di jalan raya.

Tetapi apa yang diharapkan berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di lapangan dimana anggaran yang diberikan belum mencukupi dalam menangani Traffic Light yang rusak ataupun mati, dan juga masih banyaknya masalah-masalah yang timbul seperti kemacetan, kecelakaan, dan lain sebagainya. Permasalahan yang timbul akhir-akhir ini dalam aspek kualitas pelayanan di bidang infrastruktur dan transportasi Kota Pekanbaru adalah dimana keberadaan Rambu Lalu Lintas (*Traffic Light*) yang cenderung hanya sebagai penghias saja, dimana banyak Rambu Lalu Lintas (*Traffic Light*) Di Kota Pekanbaru yang sama sekali tidak berfungsi, sementara di sisi lain, keberadaan Rambu Lalu Lintas (*Traffic Light*) sangat di perlukan guna mencegah terjadinya kemacetan, terutama kemacetan yang timbul di jam-jam sibuk seperti pagi hari,

siang hari dan juga sore hari disaat masyarakat sedang pulang kerja dan juga anak sekolah yang dalam proses selesai melaksanakan proses sekolah dan akan kembali ke rumahnya masing-masing.

Dalam hal ini fungsi pengawasan sangatlah penting karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin kelancaran dalam suatu pekerjaan sehingga berdaya guna dan berhasil guna. Pengawasan mencakup suatu upaya dalam memeriksa apakah semua yang telah dikerjakan sesuai dengan rencana atau penyimpangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pantauan yang penulis lakukan di lapangan, penulis menemukan fakta-fakta bahwa banyak Rambu Lalu Lintas (*Traffic Light*) yang memang sama sekali tidak berfungsi dan rusak, dan dengan keberadaan Rambu Lalu Lintas (*Traffic Light*) yang telah rusak demikian, tidak ada upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak pemerintah kota Pekanbaru khususnya dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Dan untuk mengetahui jumlah Rambu Lalu Lintas (*traffic light*) yang ada di kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel I.1 berikut ini:

Tabel I.1 : Jumlah Rambu-Rambu Isyarat Lampu Lalu Lintas (*Traffic Light*) yang ada di Kota Pekanbaru pada tahun 2016-2017

No	Lokasi Persimpangan	Fhase	Aset Milik	Kondisi
1	Kaharudin Nst / Soekarno Hartta	3	Dishub Kota	Berfungsi
2	Kaharudin Nst / Pasir Putih	3	Dishub Kota	Berfungsi
3	Kaharudin Nst / Teuku Bey	3	Dishub Kota	Berfungsi
4	Kaharudin Nst / Bandara	3	Dishub Prov	Berfungsi
5	Sudirman / H.Imam Munandar	3	Dishub Kota	Berfungsi
6	Sudirman / Teuku Tambusai	3	Dishub Kota	Berfungsi

7	Sudirman / Gajah Mada	3	Dishub Kota	Berfungsi
8	Gajah Mada / Diponogoro	3	Dishub Kota	Berfungsi
9	Cempaka / A.Yani	3	Dishub Kota	Berfungsi
1	2	3	4	5
10	Ratulangi / A. Yani	2	Dishub Kota	Berfungsi
11	Soekarno Hatta / Adi Sucipto	4	Dishub Kota	Berfungsi/P erbaikan
12	Soekarno Hatta / Arifin Ahmad	3	Dishub Kota	Berfungsi
13	Soekarno Hatta / T. Tambusai	4	Dishub Kota	Berfungsi
14	Soekarno Hatta / Durian	4	Dishub Kota	Berfungsi
15	Soekarno Hatta / Riau	3	Dishub Kota	Rusak
16	Riau / DI.Panjaitan	4	Dishub Kota	Berfungsi
17	H.Imam Munandar / Kapling	3	Dishub Kota	Berfungsi
18	H.Imam Munandar/ Sakuntala	4	Dishub Kota	Perbaikan
19	H.Imam Munandar/ B.Barisan	3	Dishub Prov	Rusak
20	Durian / Ahmad Dahlan	4	Dishub Kota	Berfungsi/P erbaikan
21	Durian / Rajawali	4	Dishub Kota	Berfungsi/P erbaikan
22	SM.Amin / HR.Subrantas	3	Dishub Prov	Berfungsi
23	Delima / Lobak	4	Dishub Kota	Berfungsi
24	Adi Sucipto / Rambutan	4	Dishub Kota	Rusak
25	S.Parman / Ronggo Warsito	4	Dishub Kota	Berfungsi
26	S.Parman / Cemara	4	Dishub Kota	Berfungsi
27	Hangtuah / DR.Soetomo	4	Dishub Kota	Berfungsi
28	DR.Soetomo / Sisinga Mangaraja	4	Dishub Kota	Berfungsi
29	Sisinga Mangaraja / SS.Qasim	3	Dishub Kota	Berfungsi
30	SS.Qasim / Teuku Umar	4	Dishub Kota	Berfungsi
31	Teuku Umar / DR.Soetomo	4	Dishub Kota	Berfungsi
32	SS.Qasim / Setia Budi	4	Dishub Kota	Berfungsi

33	Dahlia / Melur	4	Dishub Kota	Rusak
34	Teratai / Ahmad Dahlan	4	Dishub Kota	Rusak
35	Yos Sudarso / Paus (Rumbai)	4	Dishub Kota	Berfungsi
1	2	3	4	5
36	H.R Subrantas/ Garuda Sakti	4	Dishub Kota	Rusak
37	Sudirman / Pangeran Hidayat	2	Dishub Kota	Rusak
38	Hangtuh Ujung / Pasar Tangor	2	Dishub Prov	Rusak
39	Parit Indah / Labersa	4	Dishub Kota	Berfungsi/ Perbaikan

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2018

Pada tabel di atas jumlah keseluruhan Rambu Lalu Lintas (*Traffic Light*) yang terpasang di kota Pekanbaru adalah sebanyak 39 titik, dan dari jumlah tersebut selain pemerintah Kota Pekanbaru terdapat pula beberapa Rambu Lalu Lintas (*Traffic Light*) yang kepemilikannya adalah milik Pemerintah Provinsi Riau, meskipun kepemilikan ada di tangan Pemerintah Provinsi akan tetapi seluruh proses perawatan ada pada kendali Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru dan seluruh proses pengawasan dan pengoperasian di atur berdasarkan Peraturan Daerah kota Pekanbaru No. 02 tahun 2009. Didalam Peraturan Daerah kota Pekanbaru paragraf 3 (tiga) yaitu penyelenggaraan alat pemberi isyarat lalu lintas pasal 191 yang berbunyi “Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas dilakukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru. Dari bunyi peraturan daerah kota Pekanbaru No. 2 tahun 2009 dan juga berdasarkan bunyi visi dan misi Dinas Perhubungan kota Pekanbaru yaitu melakukan perencanaan pengawasan

dan juga pemeliharaan serta berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat”.

Jumlah Personil yang menangani masalah Traffic Light di Kota Pekanbaru Dikoordinasi oleh 1 (satu) orang Kepala Seksi, 1 (satu) orang Pengawas Lapangan dan 9 (sembilan) petugas teknisi lapangan. Minimnya pengawas lapangan untuk menangani permasalahan Traffic Light membuat pengawasan menjadi kurang maksimal, dan banyaknya jumlah pengawas, akan mempengaruhi lancarnya suatu kegiatan agar berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan permasalahan di atas yang telah penulis paparkan, dan di tambah dengan data pendukung yang penulis dapatkan dari media-media berita online di daerah Kota Pekanbaru, maka penulis menemukan fenomena-fenomena yang menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian ini, dan fenomena tersebut adalah:

1. Berdasarkan hasil pengamatan penulis dilapangan, Penulis menemukan fakta bahwa, banyak Rambu Lalu Lintas (*Traffic Light*) yang ada di Kota Pekanbaru mengalami kondisi yang rusak dan tidak berfungsi, hal ini dapat di buktikan dari data yang ada pada tabel di halaman 16 yang telah penulis sajikan.
2. Dengan banyaknya Rambu Lalu Lintas (*Traffic Light*) yang tidak berfungsi dan rusak, maka situasi demikian akan menimbulkan dampak yang mengakibatkan terjadinya kemacetan di setiap persimpangan yang pada kendaraan bermotor.

3. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan maka peneliti menduga bahwa tidak maksimalnya pengawasan dan perawatan yang dilakukan oleh Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Dan Perairan terhadap Rambu Lalu Lintas (*Traffic Light*) yang mana sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.02 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kota Pekanbaru.

Berhubungan dengan permasalahan di atas dan juga di dukung dengan fakta-fakta dilapangan yang menggambarkan bahwa masih kurang maksimalnya kinerja Dinas Perhubungan dalam menangani mengoperasikan dan juga melakukan perbaikan terhadap Rambu Lalu Lintas (*Traffic Light*) di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian adalah :“**Evaluasi Kinerja Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Dan Perairan Dalam Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas (*Traffic Light*) Di Kota Pekanbaru**”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan pada latar belakang di atas, maka Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru perlu melakukan perbaikan kinerja dalam mengoperasikan Rambu Lalu Lintas (*Traffic Light*) Di Kota Pekanbaru. Berdasarkan permasalahan yang ada di atas dan juga di dasari pada penjelasan penulis di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kinerja Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan dalam Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas (*Traffic Light*) Di Kota Pekanbaru?
2. Kendala-Kendala apa saja yang di hadapi oleh Seksi Rekayasa Dan Fasilitas Lalu Lintas dan Perairan dalam Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas (*Traffic Light*) Di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 1. Bertujuan untuk menganalisis kinerja Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Dan Perairan dalam Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas (*Traffic Light*) di Kota Pekanbaru.
 2. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Dan Perairan dalam Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas (*Traffic Light*) di Kota Pekanbaru.
- b. Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:
 1. Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu Pemerintahan, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang Ilmu Pemerintahan.

2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal di bidang yang sama.

3. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Dan Perairan dalam Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas (*Traffic Light*) di Kota Pekanbaru

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang Usulan Penelitian, penulis memaparkan teori yang menjadi bahan pendukung dan sangat diperlukan sebagai landasan teori yang dijadikan sebagai patokan dalam penelitian ini.

Definisi teori adalah serangkaian asumsi konsep, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya. Oleh karena itu untuk memperoleh jawaban yang empiris terhadap penelitian yang akan dilaksanakan, penulis akan menjelaskan kerangka teori penelitian ini.

1. Konsep Pemerintah

Sebelum melangkah lebih jauh dalam memecahkan permasalahan, maka diperlukan teori atau pengertian dari pemerintahan agar mempermudah untuk

memperoleh hasil-hasil yang objektif, Untuk itu penulis mengemukakan pendapat mengenai pengertian ilmu pemerintahan itu sendiri.

Pemerintahan secara umum merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi (keabsahan) oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan (kekuasaan negara) pada suatu negara, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara. Sehingga dapat diartikan bahwa unsur utama dari suatu pemerintahan tersebut yakni wujudnya dalam bentuk organisasi atau lembaga, organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan oleh masyarakat melalui suatu proses pemilihan umum, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara sebagai unsur pendukung dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan tersebut. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan tidak lain adalah menjalankan fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Musanef (2002;8) menyatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas tersebut dengan masyarakat yang lebih jauh ditegaskannya. Pemerintahan adalah segala upaya suatu negara untuk mencapai tujuannya.

Menurut Musanef (2002;15) penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggaraan tersebut

sekalian pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahan kecamatan juga melaksanakan tugas umum pemerintahannya yang merupakan sebagai pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada.

Menurut Admosudirjo (2004;183), manajemen pemerintahan adalah manajemen yang merupakan lanjutan langsung dari pada pemerintahan atau tindak pemerintahan (Government Act) yakni misalnya manajemen dari pada Government Staff Work, manajemen Kepolisian, Manajemen dari pada Legal Drafting (penaskahan berbagai undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya).

Adapun fungsi pemerintahan secara umum menurut Musanef (2002;22) adalah menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan pemerintahan dan pembangunan dan Pembinaan masyarakat.

Secara substansif, menurut Rasyid (2000;48), tugas pemerintahan di bagi dalam 3 (tiga) fungsi pokok yaitu : (1). Pelayanan servis (*service*). (2). Pemberdayaan (*Empowerment*). (3). Pembangunan (*development*).

Menurut Syafiie (2001;20) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni dikatakan karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, universal, sistematis dan spesifik.

Dari definisi pemerintahan menurut Syafiie (2001;21) mengemukakan bahwa pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki

wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Pemerintah dalam bahasa Inggris disebut *government* yang berasal dari bahasa Latin *Gubernate*, Greek *gubernon* yang berarti mengemudikan, atau mengendalikan.

Menurut Ndraha (2005;36) pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat. Memahami pemerintahan dengan konteks awal kejadiannya, menunjukkan bahwa hubungan yang ada antara struktur pemerintah dengan rakyat adalah hubungan yang saling menguat, yaitu bahwa pemerintah disuatu sisi berkewajiban mengikuti dan mentaati masyarakat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

Pemerintah adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antara masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat didalam sebuah masyarakat. Disana seseorang atau suatu kelompok dalam proses atau interaksi sosial terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain (Ndraha, 2001;6)

Ndraha (2003;6) menyatakan pemerintahan adalah organ berwenang memproses pelayan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui lembaga pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan ketentuan (harapan) yang diperintah. Lebih lanjut dinyatakan Ndraha bahwa pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi

kebutuhan masyarakat, serta tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil.

2. Konsep Organisasi Pemerintahan

Menurut Chester I Barnard (dalam Syafi'ie 2011 : 11) Organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktifitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak terwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.

Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih sederhana lagi diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai Suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanage, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan

Negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Sedangkan menurut Luther Gulick (dalam Syafi'ie 2011 : 12) organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan, jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

Sedangkan pemerintah menurut H Muhammad Rohidin Pranadjaja (2003:24) adalah orang, badan atau aparat dihapus atau memberi perintah. Menurut Philipus M. Hadjon dalam Sadjjono (2008:41) pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian: di satu pihak dalam arti "fungsi pemerintahan" (kegiatan pemerintahan), di lain pihak dalam arti "organisasi pemerintahan" (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). Fungsi pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan: keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dari penguasa politik dan peradilan oleh para hakim tidak termasuk di dalamnya.

Jadi Organisasi pemerintahan adalah organisasi atau kelompok yang bergerak atau berkepentingan atau terlibat dalam proses politik dan dalam ilmu

kenegaraan. Secara aktif berperan dalam menentukan nasib bangsa tersebut. Organisasi politik dapat mencakup berbagai jenis organisasi seperti kelompok advokasi yang melobi perubahan kepada politisi, lembaga yang mengajukan alternative kebijakan, partai politik yang mengajukan kandidat pada pemilihan umum, dan kelompok teroris yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politiknya. Dalam pengertian yang lebih luas, suatu organisasi politik dapat pula dianggap sebagai suatu system politik jika memiliki system pemerintahan yang lengkap. Organisasi politik merupakan bagian dari suatu kesatuan yang berkepentingan dalam pembentukan tatanan social pada suatu wilayah tertentu oleh pemerintahan yang sah. Organisasi ini juga dapat menciptakan suatu bentuk struktur untuk di ikuti.

3. Konsep/Teori Manajemen Pemerintahan

Menurut Manullang (2002 ; 3), Bila mempelajari literatur manajemen, maka akan ditemukan bahwa istilah manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan ketiga manajemen sebagai suatu seni (*art*) dan sebagai suatu ilmu.

Menurut Budiyono (dalam Terry, 2004;7) mendefinisikan manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengadilan yang dilakukan untuk menentukan melalui pemanfaatan daya manusia dan sumber daya lainnya.

Manajemen sebagai suatu seni (*Art*) dan sebagai suatu ilmu pengetahuan, tetapi banyak para pendapat dan para ahli berbeda pendapat tentang manajemen.

Ciri-ciri manajemen sebagai ilmu :

1. Kesuksesan dalam mencapai tujuan sangat di pengaruhi dan di dukung oleh sifat-sifat dan bakat.
2. Dalam proses pencapaian tujuan sering kali melibatkan unsur naluri.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan, faktor yang cukup yang menentukan keberhasilan.

Menurut Feriyanto dan Shyta (2015;4) Manajemen adalah suatu proses penyelenggaraan berbagai proses kegiatan dalam rangka menerapkan tujuan dan sebagai kemampuan dan keterampilan orang yang menduduki jabatan menejerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut pendapat Siagian (2003;5), mengatakan, manajemen dapat didefenisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dalam manajemen adanya peranan disetiap tanggungjawab untuk mencapai tujuan bersama. Berpedoman kepada sejumlah literatur ilmu administrasi dan manajemen, juga di temukan sudut pandang yang berbeda dikalangan para praktisi dan akademisi dalam merumuskan batasan atau definisi konsep menejemen.

Definisi konsep manejemen yang menunjukkan secara eksplisit esensialnya penataan terhadap sumber daya organisasi, tergambar pada rumusan yang dikemukakan oleh The Liang Gie (dalam Zulkifli 2009;16) menurutnya manajemen suatu sub konsep tata pimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakan orang orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai. Dia juga mengemukakan bahwa

manajemen sebagai suatu proses memiliki 6 fungsi utama: Perencanaan, Pembuatan keputusan, Pengarahan, Pengkoordinasian, Pengontrolan dan Penyempurnaan.

Perencanaan adalah kegiatan yang menentukan hal hal yang harus dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah di tentukan serta bagaimana cara-cara mengerjakannya.

1. *Pembuatan keputusan* adalah kegiatan yang melakukan pemilihan diantara berbagai kemungkinan untuk menyelesaikan masalah, perselisihan, keraguan yang timbul dalam kerja sama.
2. *Pengarahan* adalah kegiatan membimbing bawahan dengan jalan memberikan perintah, pemberian petunjuk, mendorong semangat kerja, menegakkan disiplin, memberikan teguran, dan lain usaha semacam itu agar mereka dalam melakukan pekerjaan mengikuti arah yang telah di tetapkan.
3. *Pengkoordinasian* adalah kegiatan menghubungkan orang-orang dan tugas tugas sehingga terjamin adanya kesatuan atau keselarasan keputusan, kebijaksanaan, tindakan, langkah, sikap serta mencegah pertentangan, kekacauan, kekembaran, kekosongan tindakan.
4. *Pengontrolan* adalah kegiatan yang mengusahakan pekerjaan serta hasil hasil kerja sesuai dengan rencana, perintah, petunjuk atau ketentuan ketentuan ditetapkan.
5. *Penyempurnaan* adalah kegiatan memperbaiki segenap segi penataan agar tujuan organisasi dapat tercapai dapat tercapai secara efisien.

3.1 Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktifitas, secara umum sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu organisasi bisa di kelompokkan atas 2 macam yaitu: (a) Sumber Daya Manusia, (b) Sumber Daya Non-Manusia.

Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya perusahaan, karyawan, dan masyarakat. (Hasibuan,2012;10)

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia bila di uraikan berasal dari kata manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen berarti mengarahkan dan mendorong Sumber Daya Manusia yang ada untuk saling bekerja sebagai partner dalam mencapai kesuksesan organisasi dimasa sekarang dan di masa yang akan datang.

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Manajemen sebagai suatu ilmu dapat pula di lihat sebagai suatu pendekatan (approach) terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh faktor ruang dan waktu, dunia yang pada prinsipnya dapat diamati oleh indra manusia. (siswanto,2011:7).

Menurut Malayu (2007 ; 9) Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara

efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen ini terdiri dari enam unsur (6 M) yaitu :*man, money,metode,materials,machines dan market*. Unsur man (manusia) ini berkembang menjadi satu Bidang Ilmu Manajemen yang di sebut Manajemen Sumber Daya Manusia.

Menurut Indrastuti dan Amries (2012 : 1) “Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya manusia (tenaga kerja) yang dimiliki individu yang di manage oleh para profesional Sumber Daya Manusia dan manajer sehingga 6M (Man, Money, Machines, Method, Materials, Market) dapat dikelola secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan (*goal*)”

Manajemen sumber daya manusia adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan rekrutmen, penempatan, pelatihan, dan pengembangan organisasi. Sedangkan Rivai (dalam Suswanto dan Donni 2011;29) mengatakan bahwa manajemen Sumber Daya Manusia merupakan satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.

Menurut Flippo (dalam Handoko 1995;6) Manajemen Sumber Daya Manusia yaitu: perencanaan, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat. Pentingnya Manajemen Sumber Daya Manusia dapat disoroti dari berbagai perspektif.

Adapun unsur-unsur sumber daya manusia yaitu: kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, karakteristik demografisnya (penduduk). Unsur

sumber daya manusia sangat berpengaruh oleh lingkungan sekitar, seperti norma-norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan dan juga peluang yang tersedia. Sumber daya manusia sangat berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Dimana dengan adanya manusia yang berpendidikan dan memiliki kemampuan dalam manajemen maka itu akan sangat membantu organisasi dalam mewujudkan tujuan yang telah di buat.

Menurut mangkunegara (2011;2) manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen sumber daya administrasi juga dapat di definisikan sebagai suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu (pegawai). Hubungan manajemen dengan sumber daya manusia merupakan proses usaha pencapaian tujuan melalui kerja sama dengan orang lain. Ini berarti menunjukkan pemanfaatan daya yang bersumber dari orang lain untuk mencapai tujuan. Untuk itu manajemen sumber daya manusia perlu dikelola secara profesional dan baik agar dapat terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan perkembangan teknologi dan lingkungan serta kemampuan organisasi. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama suatu organisasi agar dapat berkembang secara produktif dan wajar.

3.2 Manajemen Pelayanan publik

Menurut Savas (dalam Waluyo, 2007) Pada sektor publik terminologi pelayanan pemerintah (*govermant service*) diartikan sebagai pemberian pelayanan oleh agen pemerintah melalui pegawainya (*the delivery of service by a govermant*

agency using its own employees). Untuk melakukan pelayanan publik tentunya dibutuhkan manajemen sebagai tata laksana kegiatan organisasi khususnya pemerintah.

Stoner (dalam Zulkifi, 2005: 28) menyatakan bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya Pelayanan Publik disebutkan sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Suatu proses menyusun rencana, mengimplementasikan rencana, mengkoordinasikan, mengawasi dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan publik. Prinsip-prinsip manajemen pelayanan kebutuhan publik menurut LANRI (dalam Ibrahim, 2008: 27), adalah (1) Persamaan keuntungan dan logika usaha, pelanggan merasakan kualitas pelayanan sehingga memberikan keuntungan, (2) Kewenangan dalam pengambilan keputusan, pengambilan keputusan harus di desentralisasikan sedapat mungkin antara organisasi dan pelanggan.

4. Konsep Evaluasi

Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*). Evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik.

Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi apakah uang tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien.

Menurut Nurcholis (2005:169) evaluasi merupakan suatu proses yang mendasar diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Adapun menurut Sondang (2005:174) Evaluasi (penilaian) merupakan kegiatan sadar untuk membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dan yang menurut kenyataan di capai. Artinya melalui penilaian harus dapat di temukan apakah hasil yang dicapai melebihi sasaran yang telah ditentukan atau sama dengan yang diharapkan atau bahkan mungkin kurang dari yang telah dinyatakan sebagai target.

Evaluasi merupakan penilaian secara menyeluruh dari input, proses, Output dan Outcome (hasil), melalui evaluasi dapat di ketahui apakah kegiatan tersebut berhasil atau tidak (Nurcholis, 2005 : 67)

Evaluasi menurut Ndraha (2003: 201) mengatakan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.

- a. Model *before-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (prilaku treatment) tolak ukuranya adalah *before*.
- b. Model *das solen-das* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya.
- c. Model kelompok *control*-kelompok tes (diberi perlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok *control* (Ndraha,2003:202).

Evaluasi menurut Santoso (2004; 31) adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan berkaitan erat dengan perencanaan yang secara utuh adalah salah satu fungsi dalam siklus manajemen apa saja yang direncanakan.

Pendapat William N. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yaitu secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assesment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. (Dunn, 2003;608).

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi merupakan hasil kebijakan di mana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kerja adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja membantu pimpinan untuk mengambil keputusan dalam suatu kebijakan, nilai yang dihasilkan dari evaluasi membuat suatu kebijakan yang bermanfaat.

Menurut Sondang P. Siagian (2002: 147) Evaluasi (penilaian) merupakan kegiatan sadar untuk membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dan yang menurut kenyataan dicapai. Artinya melalui penilaian harus dapat ditemukan apakah hasil yang dicapai melebihi sasaran yang telah ditentukan atau sama dengan yang diharapkan atau bahkan mungkin kurang dari yang telah dinyatakan sebagai target.

Menurut pendapat diatas, evaluasi adalah penilaian secara sistematis untuk melihat sejauh mana efisiensi suatu program masukan untuk memaksimalkan keluaran. Evaluasi juga digunakan untuk mencapai tujuan dari program pencapaian hasil atau efektifitas, dan kesesuaian program kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

Evaluasi juga termasuk salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan. Sudarwan Danin mengemukakan definisi penilaian (*evaluating*) adalah proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut yaitu :

- a. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.
- b. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen.
- c. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai. (Danim, 2001;14).

Pendapat diatas dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana, sehingga diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di dalamnya. Evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya yaitu :

1. Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.
2. Interdependensi fakta-nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai.
3. Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil dimasa depan.
4. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. (Dunn, 2003;608-609).

Berdasarkan penjelasan diatas, karakteristik evaluasi terdiri dari empat karakter yaitu :

- a. Fokus nilai, karena evaluasi adalah penilaian dari suatu kebijakan dalam ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. Interdependensi fakta-nilai, karena untuk menentukan nilai dari suatu kebijakan bukan hanya dilihat dari tingkat kinerja tetapi juga dilihat dari bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat memecahkan masalah tertentu.
- c. Orientasi masa kini dan masa lampau, karena tuntutan evaluatif diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan nilai dari kebijakan tersebut.
- d. Dualitas nilai, karena nilai-nilai dari evaluasi mempunyai arti ganda baik rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada maupun nilai yang diperlukan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain.

Berdasarkan pendapat Dunn (2003;610) kriteria evaluasi adalah berikut ini:

1. Efektifitas
2. Efisiensi

3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan

Evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Dari aspek pelaksanaan, evaluasi adalah keseluruhan kegiatan pengumpulan data dan informasi, pengolahan, penafsiran dan pertimbangan untuk membuat keputusan. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan atau proses untuk mengukur dan selanjutnya menilai sampai dimanakah tujuan yang telah dirumuskan sudah dapat dilaksanakan. Evaluasi merupakan suatu proses yang mendasar diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. (Nurcholis, 2005;169).

Kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Duun (dalam Subarsono, 2013; 126), mencakup lima indikator yaitu:

1. Efektifitas, apakah hasil yang diinginkan telah tercapai
2. Kecukupan, seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah
3. Pemerataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda
4. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuat prefensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka
5. Ketepatan, apakah hasil yang dicapai bermanfaat.

Kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Duun (dalam Subarsono, 2013; 126) seperti yang telah sebutkan di atas dapat di kembangkan dalam masing-masing pengertiannya, yang mana pengertiannya adalah sebagai berikut:

a. Efektifitas

Menurut pendapat Mahmudi (2005:92) mendefinisikan efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

b. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dari berbagai hal. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003: 430).

c. Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat diartikan dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Dunn (2003: 434) menyatakan bahwa kriteria kesamaan erat hubungannya dengan rasionalitas legal, sosial, dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif , efisien dan mencukupi apabila biaya dan manfaat merata. Kunci dari pemerataan adalah keadilan atau kewajaran.

d. Responsivitas

Menurut Dunn (2003: 437) menyatakan bahwa responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat.

e. Ketepatan

Ketepatan menunjuk pada nilai atau harga diri dari tujuan program dan dari kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Dunn menyatakan bahwa kelayakan adalah kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan hubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substantif tujuan bukan cara atau instrument untuk menyelesaikan tujuan tersebut.

Berbeda dengan analisis kebijakan (policy analysis) yang memusatkan perhatian pada kemungkinan efek (probable effects) dari suatu kebijakan sebelum efek nyata terjadi. Evaluasi kebijakan merupakan suatu analisis kebijakan yang memberi perhatian sepenuhnya pada efek/dampak yang telah benar-benar terjadi. Evaluasi kinerja kebijakan merupakan penilaian yang bersifat sistematis terhadap kebijakan/program (yang dalam bentuk nyata berupa kegiatan atau sekelompok kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku lainnya) dalam rangka

membuat penetapan tentang efek/dampak kebijakan/program, baik untuk jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. (Mustopadidjaja, 2003;152).

Adapun evaluasi dengan menggunakan tipe sistematis atau juga sering disebut sebagai evaluasi ilmiah merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan dibandingkan dengan tipe evaluasi yang lain. (Winarno, 2007;230)

Namun demikian, evaluasi tentang dampak kebijakan pada dasarnya hanya merupakan salah satunya saja dari apa yang bisa dilakukan oleh seorang evaluator dalam melakukan evaluasi kebijakan. Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang dapat dilakukan seorang evaluator dalam melakukan evaluasi kebijakan publik, ketiga hal tersebut adalah :

- a. Evaluasi kebijakan mungkin menjelaskan keluaran-keluaran kebijakan, seperti misalnya pekerjaan, uang, materi yang diproduksi dan pelayanan yang disediakan.
- b. Evaluasi kebijakan barang kali mengenai kemampuan kebijakan dalam memperbaiki masalah-masalah sosial seperti misalnya usaha untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan mengurangi tingkat kriminalitas.
- c. Evaluasi kebijakan barang kali menyangkut kebijakan-kebijakan dalam bentuk policy fed back, termasuk di dalamnya reaksi dan tindakan-tindakan pemerintah atau pernyataan dalam sistem pembuatan kebijakan atau dalam beberapa pembuat keputusan. (winarno, 2007;230-232).

Untuk melakukan evaluasi baik dengan margin kesalahan yang minimal, beberapa ahli mengembangkan langkah-langkah dalam evaluasi kebijakan. Salah satunya adalah menurut Edward A. Suchman dalam winarno (2007;230) mengemukakan 6 (enam) langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

Menurut Santoso, (2004;31) evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan yang berkaitan erat dengan perencanaan yang secara utuh adalah salah satu fungsi dalam siklus manajemen apa saja yang direncanakan.

Kemudian dijelaskan bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang mengukur dan memberi nilai secara objektif dan valid, dimana sebagian besar manfaat pelayanan yang telah dicapai berdasarkan tujuan dari objek yang seharusnya diberikan dan yang nyata apakah hasil-hasil dalam pelaksanaan telah efektif dan efisien. (Wiryo Projudikoro, 2001;71)

Tujuan evaluasi untuk perbaikan mengandung implikasi diperlukannya langkah berupa penilaian (*judgement*). Dengan kata lain, evaluasi dilakukan dalam rangka menilai tingkat efektifitas dari suatu kebijakan (*Policy effectiveness*). Hasil evaluasi bermanfaat dalam rangka perbaikan terhadap rumusan kebijakan dan/atau implementasi kebijakan. (Mustopadidjaja, 2003;153)

Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Jadi evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan. (Nugroho, 2008;184)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses penilaian atau penafsiran apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan dan sejauh mana dapat dilaksanakan kebijakan tersebut.

Dengan kata lain, evaluasi merupakan proses dimana keberhasilan yang dicapai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang diharapkan. Perbandingan ini kemudian dilanjutkan dengan pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh pada kegagalan dan keberhasilan. Evaluasi ini dapat dilakukan secara internal oleh mereka yang melakukan proses yang sedang dievaluasi ataupun oleh pihak lain, dan dapat dilakukan secara teratur maupun pada saat yang tidak beraturan. Proses evaluasi dilakukan setelah sebuah kegiatan selesai, dimana kegunaannya adalah untuk menganalisa apakah keluaran, hasil ataupun dampak dari kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang diinginkan.

5. Konsep Kinerja

Secara umum, definisi kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai sesuai dengan tanggungjawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya. Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Istilah kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance (Prestasi kerja atau prestasi yang sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan bahwa kinerja berarti: (1) sesuatu yang dicapai, (2) prestasi yang diperlihatkan, (3) kemampuan kerja. Pengertian kinerja (Prestasi

kerja) merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya (Mangkunegara, 2005 : 67). Lebih lanjut lagi, Mangkunegara menyatakan bahwa pada umumnya kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi, kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dengan kinerja kelompok (Mangkunegara, 2005).

Samsudin (2005:159) menyebutkan bahwa: “Kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan”.

Menurut Viethzal (2004 : 309) kinerja adalah suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Kinerja merupakan pelaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam organisasi. Kinerja pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya organisasi untuk mencapai tujuannya.

Menurut Sudarmayanti (2003 : 147) kinerja (performance) adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum, sesuai dengan moral dan etika. Sedangkan menurut Ruky (2004 : 33) kinerja (prestasi kerja) adalah kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil, yang dihubungkan dengan misi yang diemban oleh suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan yang diambil.

Kinerja berdasarkan Hasibuan (2007 : 94) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasari atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, serta waktu. Prestasi kerja merupakan gabungan dari tiga faktor penting yaitu, kemampuan dan minat seorang pekerja, kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas, serta peran dan tingkat motivasi seorang pekerja.

Menurut Mangkunegara (2005 : 9) kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Mangkunegara (2005 : 141), kinerja pegawai tersebut dapat diukur dari:

1. Pengetahuan tentang pekerjaan
2. Kualitas kerja
3. Produktivitas
4. Adaptasi
5. Inisiatif dan pemecahan masalah
6. Kerjasama
7. Tanggungjawab
8. Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi

Menurut Sianipar (2000 : 5) mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja dari fungsi kerja atau kegiatan tertentu selama satu periode waktu tertentu. Dalam Sedarmayanti (2003 : 152) mengartikan kinerja (performance) sebagai hasil kerja seseorang dan merupakan suatu proses manajemen dari suatu organisasi secara keseluruhan dimana hasil kerja tersebut dapat ditunjukkan secara konkrit dan dapat (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan). Ada beberapa kata kunci dari defenisi kinerja tersebut yaitu:

1. Hasil kerja pekerja
2. Proses atau organisasi
3. Terbukti secara konkrit
4. Dapat diukur
5. Dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan

Menurut Anwar P. Mangkunegara (2005 : 9) kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pencapaian kinerja dalam suatu lembaga instansi pemerintah (termasuk pemerintah daerah) sering diukur dari sudut pandang masing-masing stakeholders, misalnya lembaga legislatif, instansi pemerintah, pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum. Idealnya pengukuran kinerja yang dipakai oleh instansi pemerintah disusun setelah memperoleh masukan dari lembaga konstituen, sehingga diperoleh suatu konsensus atas apa yang diharapkan oleh stakeholder atas organisasi tersebut. Dalam rangka pencapaian sasaran dan

tujuan organisasi, organisasi disusun dalam unit-unit kerja yang lebih kecil, dengan pembagian kerja, sistem kerja dan mekanisme yang jelas. (Rivai, 2004:309).

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. (Rivai, 2004:309)

5.1 Manfaat Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja adalah proses pengukuran kinerja seseorang. Penilaian kinerja merupakan pengawasan terhadap kualitas personal. Penilaian kinerja (performance appraisa) pada dasarnya merupakan salah satu faktor kunci ganda mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program penilaian prestasi kerja. Berarti organisasi telah memanfaatkan secara baik atas SDM (sumber daya manusia) yang ada dalam organisasi (dalam sulistiyani dan Rosidah, 2000 : 223-224).

Menurut Handoko (2001) penilaian kinerja adalah “proses melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai kinerja karyawan”. Penilaian kinerja pada umumnya mencakup aspek kuantitatif maupun kualitatif dari kinerja pelaksanaan pekerjaan.

Dalam melaksanakan kegiatan dan hubungan kerja yang baik diperlukan pembinaan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak terjadi banyak kesalahan dan

dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Dalam kehidupan suatu organisasi ada beberapa tentang perilaku manusia sebagai sumber daya manusia, yang mendasari pentingnya penilaian kinerja. Menurut Notoadmodjo (2003:141) asumsi tersebut antara lain:

1. Setiap orang ingin memiliki peluang untuk mengembangkan kemampuan kerjanya sampai tingkat yang maksimal.
2. Setiap orang ingin mendapatkan penghargaan apabila ia dinilai melaksanakan tugas dengan baik.
3. Setiap orang ingin mengetahui secara pasti tangga karier yang akan diraihinya apabila dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
4. Setiap orang ingin mendapatkan perlakuan yang objektif dan penilaian atsa dasar kinerjanya.
5. Setiap orang bersedia menerima tanggung jawab yang lebih besar.
6. Setiap orang pada umumnya tidak hanya melakukan kegiatan yang sifatnya rutin.

Penilaian menurut Siagian (2002:168) merupakan proses dimana organisasi berupaya memperoleh informasi yang seakurat mungkin tentang kinerja para anggotanya. Penilaian kinerja harus dilakukan dengan baik karena sangat bermanfaat bagi organisasi secara keseluruhan bagi para atasan dan juga bagi para pegawai/karyawan yang bersangkutan.

Notoadmodjo (2003 : 143-145), mengatakan bahwa penilaian yang baik harus memberikan gambaran akurat tentang yang diukur. Artinya penilaian tersebut benar-benar menilai prestasi pekerjaan pegawai atau karyawan yang dinilai meliputi:

1. Penilaian harus mempunyai hubungan dengan pekerjaan (job related). Artinya system penilaian itu benar-benar menilai perilaku/kerja yang mendukung kegiatan organisasi dimana karyawan itu bekerja.
2. Adanya standar pelaksanaan kerja (performance standart). Standar pelaksanaan adalah yang dipakai untuk menilai prestasi kerja tersebut.

3. Praktis, system penilaian yang praktis, mudah dipahami dan dimengerti serta digunakan, baik oleh penilai maupun karyawan atau pegawai.

Tujuan dari penilaian kinerja menurut Sulistiyani dan Rosidah (2003 : 224-225) adalah:

1. Untuk mengetahui tujuan dan sasaran manajemen pegawai
2. Memotivasi pegawai untuk memperbaiki kinerjanya
3. Mendistribusikan reward dari organisasi yang dapat berupa penambahan gaji atau upah dan promosinya yang adil
4. Mengadakan penelitian manajemen personalia

Notoadmodjo (2003 : 142-143) mengatakan manfaat dan penilaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja
2. Kesempatan kerja yang adil
3. Kebutuhan penilaian pekerjaan
4. Penyesuaian kompensasi
5. Keputusan promosi dan demosi
6. Kesalahan desain
7. Penyimpangan proses rekrutmen dan seleksi

Dari pendapat diatas dapat dianalisa bahwa didalam suatu organisasi sangat diperlukan adanya penilaian kinerja terhadap pegawai, supaya dapat memberikan manfaat dan tujuan yang bisa dilihat seberapa baik hasil kerja yang dilakukan seorang pegawai.

5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja merupakan suatu konstruksi multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Payaman Simanjuntak (2005 : 10) menjelaskan bahwa kinerja pegawai dipengaruhi beberapa faktor, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) faktor yaitu:

1. Kompetensi individu, yaitu kemampuan dan keterampilan melakukan kerja yang mana kemampuan dan keterampilan seseorang dipengaruhi oleh kebugaran fisik, pendidikan, akumulasi pelatihan dan pengalaman kerja.
2. Dukungan Organisasi, yaitu setiap orang tergantung pada dukungan organisasi dalam bentuk pengorganisasian penyediaan sarana dan prasarana kerja, pemilihan teknologi dan pengamanan lingkungan kerja termasuk kondisi dan syarat kerja.

Dukungan manajemen, yaitu kinerja suatu organisasi atau individu sangat tergantung pada kemampuan manajerial para manajemen atau pimpinan, baik dengan cara membangun sistem kerja dan hubungan industrial yang aman dan harmonis, maupun dengan mengembangkan kompetensi pekerjaan dan memberikan motivasi dan memobilisasi seluruh karyawan agar bekerja secara optimal.

Mangkunegara (2007:13) mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang sebagai berikut:

1. Faktor kemampuan, secara umum ini terbagi menjadi 2 yaitu kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realiti (knowledge dan skill). Artinya pimpinan dan karyawan yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) apalagi superior, very superior, gifted dan jenius dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai kinerja maksimal.
2. Faktor motivasi yaitu motivasi terbentuk dari sikap karyawan dalam menghadapi situasi kerja di lingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap positif (pro) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka bersikap negatif (kontra) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi yang dimaksud antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja. Kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja dan kondisi kerja.

Menurut Ruky (2006 : 8) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai yaitu:

1. Memotivasi pegawai atau karyawan, dalam hal memotivasi pegawai bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua agar bersemangat dalam mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Dengan adanya motivasi para pegawai mempunyai dorongan bekerja dengan erat karena adanya perhatian yang baik terhadap kebutuhan dan keinginan mereka yang mana dalam suatu organisasi tergantung pada tinggi rendahnya taraf perealisasi dari tujuan perseorangan dalam melakukan kesiapan.
2. Sarana dan prasarana, lingkungan kerja dari para pegawai pengaruh yang sangat besar terhadap operasional organisasi, dengan demikian suatu yang ada disekitar para pegawai dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Selanjutnya kebersihan, keamanan dan kesalahan kerja merupakan hal-hal yang harus diperhatikan oleh suatu organisasi.
3. Kemampuan SDM, kemampuan SDM yang tinggi dapat mendorong kinerja yang diinginkan.
4. Kuantitas bahan baku dan bahan pembantu, prosedur pengadaan bahan baku juga akan berpengaruh terhadap tingkat efisiensi dan produktivitas. Gejala itu terlihat apabila terdapat hambatan dalam melakukan pekerjaan.
5. Proses kerja atau Metode kerja, dimaksudkan proses kerja atau metode kerja adalah cara kerja sebuah tim akan melakukan penelitian terhadap kerja yang digunakan dan proses yang dijalankan. Pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas ini sangatlah penting, karena hal tersebut kemudian dapat membuat personalia mampu memilih faktor-faktor peningkatan produktivitas kinerja yang sesuai dengan situasi tertentu.

6. Konsep Kinerja Organisasi Pemerintah

Tekanan terhadap organisasi sektor publik, khususnya organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah adalah memperbaiki kinerjanya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat menjalankan pemerintahan dengan efektif dan efisien dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Menurut Wibowo (2008:7), kinerja berasal dari pengertian performance yaitu sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja berkaitan dengan melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari suatu

pekerjaan. Selain itu menurut Amstrong dan Baron dalam (Wibowo 2008:7), kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi.

Sedangkan menurut Mahsun (2006:25), kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategis planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai.

Menurut Pasolong (2010:175), konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi yaitu kinerja pegawai (individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Sedangkan menurut Wibowo dalam Pasolong (2010:176), kinerja organisasi merupakan efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif.

Menurut Pasolong (2010:375), kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa

terlepas dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang dijalankan oleh pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja organisasi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap individu yang bekerja dalam organisasi. Apabila dalam organisasi setiap individu bekerja dengan baik, berprestasi, bersemangat dan memberikan kontribusi terbaik mereka terhadap organisasi maka kinerja organisasi secara keseluruhan akan baik. Dengan demikian, kinerja organisasi merupakan cermin dari kinerja individu.

Menurut Sinambela (2012:181), kinerja organisasi merupakan kumulatif kinerja pegawai, oleh karenanya semakin tinggi kinerja pegawai akan semakin tinggi pula kinerja organisasi. Sedangkan menurut Nasucha dalam (Sinambela,2012:186), kinerja organisasi didefinisikan juga sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa esensi dari kinerja organisasi adalah gambaran mengenai hasil kerja dari kegiatan kerjasama di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini kinerja organisasi yang dimaksud adalah tingkat pencapaian ataupun hasil kerja dari Dishub Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya dalam pengoperasian Rambu Lalu Lintas (*Traffic Light*) Di Kota Pekanbaru.

7. Konsep Rambu Lalu Lintas

Rambu lalu lintas menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 61 tahun 1993 diartikan adalah Salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan / atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No : 32 Tahun 2011 menyatakan “Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya”.

Dalam keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat (Nomor: SK.116/AJ.404/DRJD/97) tentang penyelenggaraan rambu lalu lintas meliputi:

1. Inventarisasi tingkat pertumbuhan rambu lalu lintas.
2. Survei untuk menentukan kebutuhan rambu termasuk penentuan lokasi penempatan atau pemasangannya.
3. Perkiraan kebutuhan pasang untuk 5 tahun.
4. Penyusunan program dan pengadaan rambu

Jenis rambu-rambu lalu lintas yang tercantum di undang-undang pemerintah terbagi menjadi 4 yaitu :

1. Rambu peringatan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan.
2. Rambu larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.
3. Rambu perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.

4. Rambu petunjuk adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.

Secara fisik rambu-rambu dibagi menjadi 2 bagian :

1. Daun rambu adalah plat aluminium atau bahan logam lainnya tempat ditempelkan/dilekatkannya rambu.
2. Tiang rambu adalah batangan logam atau bahan lainnya untuk menempelkan atau melekatkan daun rambu.

Rambu yang efektif harus memenuhi hal-hal berikut:

1. memenuhi kebutuhan.
2. menarik perhatian dan mendapat respek pengguna jalan.
3. memberikan pesan yang sederhana dan mudah dimengerti.
4. menyediakan waktu cukup kepada pengguna jalan dalam memberikan respon.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan pemasangan rambu adalah :

1. Keseragaman bentuk dan ukuran rambu.
Keseragaman dalam alat kontrol lalu lintas memudahkan tugas pengemudi untuk mengenal, memahami dan memberikan respon. Konsistensi dalam penerapan bentuk dan ukuran rambu akan menghasilkan konsistensi persepsi dan respon pengemudi.
2. Desain rambu.
Warna, bentuk, ukuran, dan tingkat retrorefleksi yang memenuhi standar akan menarik perhatian pengguna jalan, mudah dipahami dan memberikan waktu yang cukup bagi pengemudi dalam memberikan respon.
3. Lokasi rambu
Lokasi rambu berhubungan dengan pengemudi sehingga pengemudi yang berjalan dengan kecepatan normal dapat memiliki waktu yang cukup dalam memberikan respon.

4. Operasi rambu

Rambu yang benar pada lokasi yang tepat harus memenuhi kebutuhan lalu lintas dan diperlukan pelayanan yang konsisten dengan memasang rambu yang sesuai kebutuhan.

5. Pemeliharaan rambu

Pemeliharaan rambu diperlukan agar rambu tetap berfungsi baik.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian yang sedang penulis kerjakan pada penelitian ini. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian yang sedang penulis kerjakan. Dan untuk melihat penelitian terdahulu dalam penelitian ini maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu Terkait dengan judul Evaluasi Kinerja Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan Dalam Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas (Traffic Light) Di Kota Pekanbaru

Nama Penelitian	Judul	Tahun	Indikator	Perbedaan
1	2	3	4	5
Elsye Adella	Analisis Pelaksanaan Pemeliharaan Traffic light Oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.	2017	1. Inspeksi 2. Kegiatan Teknik 3. Kegiatan Perawatan	1. Teori 2. Indikator

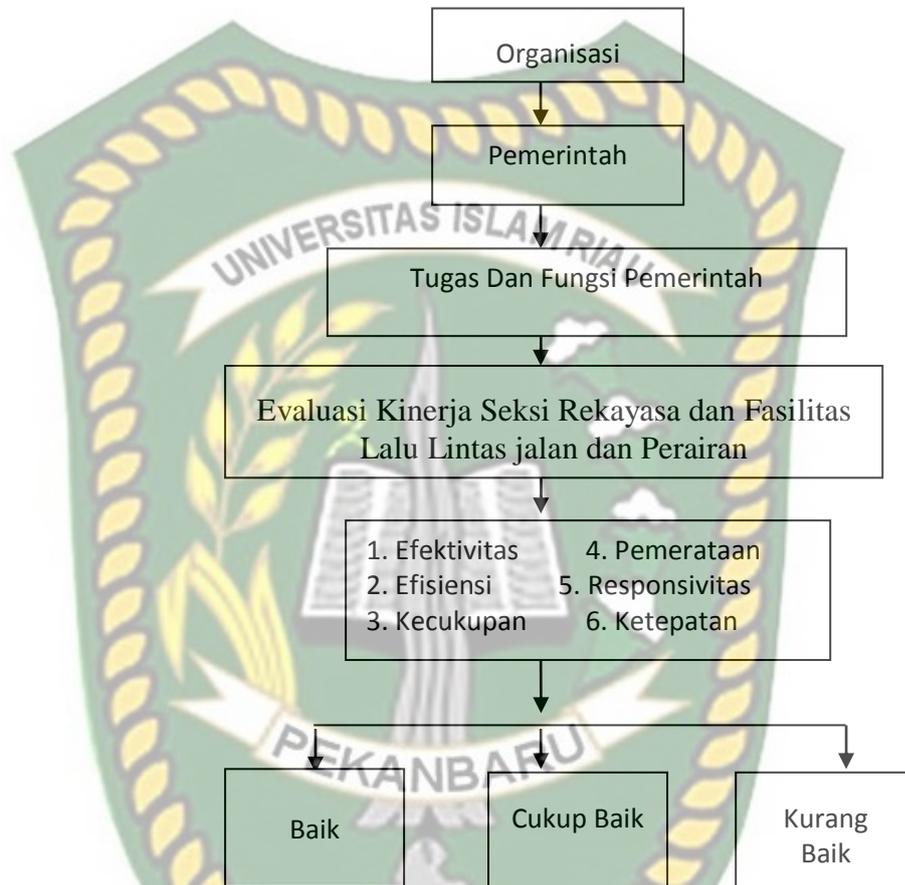
C. Kerangka Pikir

Kerangka Pikiran adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka pikiran ini di susun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka pemikiran merupakan buatan sendiri dengan panduan ataupun teori yang di gunakan sebagai bahan untuk mengukur berhasil atau tidaknya penelitian.

Kerangka pemikiran bertujuan untuk membantu menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang dihadapi penelitian yang diberi judul “Evaluasi Kinerja Seksi Rekayasa Dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan dalam Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas (*Traffic Light*) Di Kota Pekanbaru”.

Sesuai dengan konsep dan teori-teori yang telah dikemukakan pada pembahasa konsep-konsep di atas, maka adapun kerangka pikiran yang digambarkan sebagi berikut :

Gambar II.2 : Kerangka Pikir Peneitian yang berjudul Tentang Evaluasi Kinerja Seksi Rekayasa Dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan dalam Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas (*Traffic Light*) Di Kota Pekanbaru.



Sumber : Hasil Modifikasi Penulis, 2018

D. Hepotesis

Menurut Sugiyono (2013:64) Hipotesisi deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel tunggal/mandiri. Maka hipotesis yang di gunakan oleh penulis di dalam penelitian ini adalah hipotesis deskriptif karna menggunakan variable tunggal. Oleh sebab itu berdasarkan kerangka pikir diatas penulis menduga bahwa: ***Kinerja Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Dan Perairan Dalam Pelaksanaan***

Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas (Traffic Light) Di Kota Pekanbaru Kurang Terlaksana.

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari dari kesalahan pemahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, Maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut:

1. Konsep Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu
2. Organisasi Pemerintahan adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta caar formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang/sekelompok orang yang disebut bawahan
3. Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen yang dilakukan untuk mengatur Pelayanan yang sesuai dengan standar
4. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana, sehingga diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di dalamnya. Evaluasi

yang dimaksud adalah untuk menilai Evaluasi Kinerja Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Dan Perairan dalam Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas (Traffic Light) Di Kota Pekanbaru.

5. Indikator Variabel Evaluasi adalah:

1. Efektivitas.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai

2. Efisiensi.

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

3. Kecukupan.

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal.

William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

4. Pemerataan.

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan public. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

5. Responsivitas.

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan.

6. Ketepatan.

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan layak.

F. Operasionalisasi Variabel

Tabel II.II : Oprasionalisasi Variabel Evaluasi Kinerja Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan Dalam Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas (Traffic Light) di Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Evaluasi (Penilaian) merupakan kegiatan sadar untuk membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dan yang menurut kenyataan di capai. Menurut William N. Dunn (2003:610)	Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.	1. Efektivitas	a. Pembentukan Tim Kerja di Bidang Pengoperasian Traffic Light di Kota Pekanbaru. b. Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Personil.	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		2. Efisiensi	a. Penyusunan Program Kerja. b. Ketersediaan Anggaran Untuk Pengoperasian Traffic Light.	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		3. Kecukupan	a. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Traffic Light. b. Pelaksanaan Pewartan Terhadap Traffic Light.	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		4. Pemerataan	a. Pelaksanaan Perbaikan Terhadap Traffic Light. b. Penggantian Unit Traffic Light yang Rusak.	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		5. Responsivitas	a. Memberikan respon cepat terkait dengan laporan kerusakan Traffic Light. b. Menyediakan tempat pengaduan bagi masyarakat.	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		6. Ketepatan	a. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Traffic Light. b. Penyediaan Personil Pengawas di lapangan.	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Sesuai dengan permasalahan, maka tipe penelitian menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu. Latar sosial tersebut digambarkan sedemikian rupa sehingga dalam melakukan penelitian kualitatif mengembangkan pertanyaan dasar : apa dan bagaimana kejadian itu terjadi ; siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut ; kapan terjadinya ; dimana tempat kejadiannya. Untuk mendapatkan hasil penelitian kualitatif yang terpercaya, masih dibutuhkan beberapa persyaratan yang harus diikuti sebagai suatu pendekatan kualitatif, mulai dari syarat data, cara/teknik pencarian data, pengolahan data, sampai dengan analisisnya. Dimana permasalahan yang akan diteliti adalah Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Pengoperasian Rambu Lalu Lintas (*Traffic Light*) Di Kota Pekanbaru.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul peneliti, maka peneliti ini akan dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih Dinas tersebut karena berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan penulis menemukan fakta bahwa masih banyak rambu lampu lalu lintas (*Traffic Light*) di Kota Pekanbaru yang belum berfungsi secara normal dan bahkan rusak dan tidak ada upaya perbaikan yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

C. Informan dan Key Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan ini. Informan atau aktor kunci dalam penelitian lapangan merupakan anggota yang dihubungi peneliti dan yang menjelaskan atau yang menginformasikan tentang lapangan. Walaupun hampir setiap orang dapat menjadi seorang informan, tidak setiap orang menjadi informan yang baik (Spradley,1979:45). Sedangkan yang dimaksud dengan informan kunci (key informan) merupakan penerjemah (*translator*). Hal ini sering kali individu dengan siapa peneliti mengembangkan suatu persahabatan khusus. Ini lebih berguna untuk memandang informan-informan kunci sebagai individu-individu yang bisa mengajar peneliti. Guru itu bisa berbeda menurut topik dan hubungan antara individu-individu. Seringkali ada banyak guru atau ada suatu guru ataupun mentor khusus (Crabtree & Miller, 1992:74).

a. Informan

Karena keterbatasan penulis untuk meneliti seluruh pihak-pihak yang terkait, maka penulis perlu untuk memilih beberapa informan yang cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini. Namun pada penelitian ini, jumlah informan tidaklah terbatas pada informan yang akan ditetapkan selanjutnya. Informan pada penelitian ini akan terus bertambah jika penulis merasa belum mendapatkan jawaban yang sesuai dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

b. Informan

Adapun yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah

1. Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2. Seksi Rekayasa dan Fasilitasi Lalu Lintas Jalan dan Perairan
3. Seksi Pengawasan Lalu Lintas Jalan
4. Masyarakat pengguna Jalan di kota Pekanbaru

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Iskandar (2008;252), Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan responden tentang bagaimana Fungsi Bidang Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan dan Perairan Dalam Melaksanakan Tugas Dalam Pengoperasian Rambu Lalu Lintas (Traffic Light).

2. Data Sekunder

Menurut Iskandar (2008;253), Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (tulisan dan lainnya yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian). Data sekunder dalam penelitian ini

diperoleh dari literature buku-buku dan data yang dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia secara tertulis serta data-data yang lain menurut penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penyusunan penulisan, maka teknik yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi (pengamatan langsung), Menurut Usman (2009;52) teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap fungsi bidang manajemen dalam menjalankan tugas pengoperasian rambu lalu lintas (traffic light).
2. Wawancara, Menurut Riduwan (2009;29) wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini penulis melakukan Tanya jawab dengan pihak yang terlibat, dengan alasan sebagai sumber informasi untuk mengetahui bagaimana fungsi bidang manajemen dalam menjalankan tugas pengoperasian rambu lalu lintas (traffic light).
3. Dokumentasi, Menurut Riduwan (2009;31) teknik dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan konsep teori penelitian ini.

F. Teknik Analisa Data

Setelah semua data dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya, setelah itu di analisis secara deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan dan hasilnya akan disajikan dan dilengkapi dengan uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat diambil kesimpulan.

Untuk mendeskripsikan fakta-fakta pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap dalam aspek yang diteliti agar jelas kondisi sebenarnya. Penemuan gejala-gejala itu berarti tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungannya serta dengan yang lain didalam aspek yang diteliti.

G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.1 : Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Fungsi Bidang Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan dan Perairan Dalam Melaksanakan Tugas Dalam Pengoperasian Rambu Lalu Lintas (Traffic Light) di Kota Pekanbaru.

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2017-2018															
		Mei				September				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP	x	x	X	x												
2	Seminar UP					x	x	x									
3	Perbaikan UP							x	x								
4	Pengurusan Rekomendasi penelitian								x	X							
5	Penelitian Lapangan dan wawancara									x	x	x	x				
6	Penyusunan laporan Penelitian (skripsi)										x	x	x				
7	Konsultasi Perbaikan Skripsi											x	x	x			
8	Ujian Skripsi														x	X	
9	Revisi dan Perbaikan Skripsi															X	X
10	Penyerahan skripsi															X	X

Sumber Olahan Penulis 2018

H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

Pada bab ini berisikan penguraian atau penjelasan dari pengertian, defenisi, konsep dan teori yang menyangkut studi kepustakaan. Dan dilanjutkan dengan Kerangka Fikir, Hipotesis, Konsep Operasional dan Operasionalisasi Variabel serta Teknik Pengukuran Variabel.

BAB III: METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisikan tentang Tipe penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Penarikan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Jadwal dan Kegiatan Waktu Kegiatan Penelitian dan Rencana Sistematika Laporan Penelitian.

BAB IV: DESKRIPTIF LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran instansi yang menjadi objek penelitian, dijelaskan pula sejarah dinas dari awal berdirinya.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas analisis dalam penelitian serta berisi jawaban atas pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan-perumusann masalah.

BAB VI : PENUTUP

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Perkembangan kota Pekanbaru ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (*pekan*) bagi para pedagang dari dataran tinggi Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat permukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah “Dewan Menteri” dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku Minangkabau (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini. (<http://wikipedia.Indonesia.com.pekanbaru>).

Berdasarkan *Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seseorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1942. Setelah penduduk Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seseorang gubernur militer yang disebut *gokung*, (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru di jadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk kedalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/1/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjung Pinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau).

(<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1987 luas kota pekanbaru dikembangkan dari 62,96 Km dengan 8 Kecamatan, 36 Kelurahan dan 9 Desa. Pembagian ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Namun berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2003 beberapa kecamatan Pekanbaru kembali dimekarkan . kecamatan yang dimekarkan itu antara lain, Kecamatan Payung sekaki yang merupakan pemekaran dari kecamatan Tampan, kecamatan Tenayan Raya dan Marpoyan Damai yang merupakan pemekaran dari kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Rumbai. Adapun luas keseluruhan dari Kota Pekanbaru mencapai 632,36 Km². dan untuk mengetahui secara rinci luas dari pada masing-masing kecamatan di Daerah

kota Pekanbaru ini maka dapat dilihat melalui tabel berikut : terkadang menimbulkan beberapa masalah seperti pengangguran dan perumahan, yang kemudian menimbulkan peningkatan angka kriminalitas. Diperkirakan jumlah penduduk kota pekanbaru untuk saat ini berjumlah 847,378 jiwa yang tersebar pada 12 kecamatan, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Pekanbaru Kota	27.059	2.68%
2.	Senapelan	38.183	3.78%
3.	Sukajadi	49.336	4.88%
4.	LimaPuluh	43.982	4.35%
5.	Sail	22.956	2.27%
6.	Rumbai	73.231	7.24%
7.	Rumbai Pesisir	72.970	7.21%
8.	Bukit Raya	106.161	10.50%
9.	Tenayan Raya	142.519	14.09%
10.	Marpoyan Damai	141.569	14.00%
11.	Tampan	194.331	19.21%
12.	Payung Sekaki	99.170	9,80%
	JUMLAH	1.011.467	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2017

Dari tabel diatas tampak bahwa penduduk terdapat diwilayah kecamatan Tampan dengan Jumlah penduduk 194.331 jiwa atau sekitar 19,21% dari jumlah keseluruhan dari jumlah penduduk. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah Kecamatan Pekanbaru Kota yaitu 27.059 jiwa atau sekitar 2,68% dari jumlah keseluruhan penduduk kota Pekanbaru.

Tabel IV.2 Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (KM)	Persentase (%)
1.	Pekanbaru Kota	2.26	0.36%
2.	Senapelan	6.65	1.05%
3.	Sukajadi	5.10	0.81%
4.	LimaPuluh	4.04	0.64%
5.	Sail	3.26	0.52%
6.	Rumbai	105.23	16.64%
7.	Rumbai Pesisir	96.75	15.30%
8.	Bukit Raya	94.56	14.96%
9.	Tenayan Raya	108.84	17.21%
10.	Marpoyan Damai	89.86	14.21%
11.	Tampan	63.08	9.98%
12.	Payung Sekaki	52.63	8.32%
	JUMLAH	632.26	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2017

Daari uraian diatas terlihat bahwa kecamatan terluas di daerah kota Pekanbaru adalah Kecamatan Km2 sedangkan Kecamatan terkecil dan tersempit adalah Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru dengan Luas Wilayahnya 2.26 km.

Dengan jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang cukup padat serta perkembangan pembangunan yang sangat cepat maka di perlukan pendidikan untuk menggerakkan laju pembangunan tersebut. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan yang membicarakan disiplin keilmuan formal tetapi di dalam pendidikan terkandung muatan berbagai pemahaman yang esensial akan seluruh tata kehidupan manusia.

Pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru merupakan salah satu hal yang patut mendapat perhatian. Sebagai salah satu kota metropolitan, pekanbaru menjadi tujuan masyarakat luar daerah untuk mencari peruntungan.

Berikut disertakan pula jumlah penduduk agama dari penduduk Kota Pekanbaru, yang mempunyai keterkaitan erat dengan tingkat kriminalitas di

pekanbaru. Dengan agama pada dasarnya seorang manusia dapat mengendalikan dirinya dari kejahatan. Berikut tabel agama resmi yang diberlakukan di Kota Pekanbaru.

Tabel IV.3 Jumlah Agama Resmi dan Penganutnya di Daerah Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Islam	861.803	86.36%
2.	Kristen Katolik	53.471	5.31%
3.	Kristen Protestan	65.990	6.48%
4.	Hindu	7.323	0.51%
5.	Budha	22.880	1.52%
	JUMLAH	1.011.467	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2017

Dari tabel diatas dapat disimpulkan, bahwa islam adalah agama yang paling banyak dianut penduduk di kota pekanbaru. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk keseluruhan yaitu 1.011.467 jiwa, sebanyak 861.803 jiwa merupakan pemeluk agama islam, selebihnya pemeluk agama Kristen protestan, Kristen katolik Budha dan Hindu.

Dalam upaya menjamin kelangsungan hidup diri dan keluarga, masyarakat Kota Pekanbaru telah Berusaha memenuhi kebutuhan itu sebagai tujuan yang asasi bagi setiap inividu dengan bekerja atau berusaha pada berbagai faktor,sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masin individu.

B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdiri pada tanggal 28 Oktober 1988 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan sebagai instansi yang melaksanakan tugas serta fungsi dalam memajukan kehidupan

masyarakat di sector perhubungan baik darat, laut dan udara dalam rangka memajukan perekonomian di Indonesia khususnya Kota Pekanbaru sebagaimana yang tertuang dalam tujuan pembangunan nasional. Dinas ini dulunya bernama Dinas LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), kemudian adanya UU No.22 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000 yang menjadi dasar dari otonomi daerah, terbitlah perda No.7 Tahun 2001 membuat dinas ini berganti nama menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Penyempurnaan UU No. 22 Tahun 1999 oleh UU No. 32 Tahun 2004 serta PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Perda No. 8 Tahun 2008 dan Perwako No.8 Tahun 2009 akhirnya mengganti nama dinas ini menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru atau Dishub kominfo Kota Pekanbaru (Sumber : UPTD Terminal BRPS Kota Pekanbaru, 2013).

Untuk menunjang keberhasilan dalam pencapaian Visi Kota Pekanbaru 2020, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kebijakan. Visi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah :
“Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan jasa Transportasi, pos dan telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau.”

Visi ini mempunyai makna yaitu Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya mempertahankan pelayanan yang sudah diberikan, juga akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kota disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan, serta selalu berkoordinasi dengan dinas-instansi terkait dalam mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan aspirasi pemerintah kota Pekanbaru.

Untuk mewujudkan Visi dinas perhubungan kota Pekanbaru, maka visi tersebut dijabarkan menjadi empat buah misi yang diemban yaitu :

1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional.
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan.
3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, sistem jaringan transportasi.
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan Operasional perhubungan.

Dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka sejumlah tujuan dan sasaran yang lebih terarah juga perlu ditetapkan. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM perhubungan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di sector perhubungan dan kesekretariatan.
- b. Melaksanakan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
- c. Melaksanakan Rehabilitas/pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
- d. Melaksanakan Peningkatan Pelayanan Angkutan
- e. Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
- f. Tersedianya Fasilitas dan perlengkapan jalan yang memadai
- g. Terlaksananya kegiatan penataan tower di Kota Pekanbaru

Sedangkan sasaran dan yang ingin dicapai adalah :

1. Aparatur Perhubungan yang profesional
2. Terencana dan termonitornya penyelenggaraan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan,
3. Terpeliharanya peralatan beserta kantor pengujian, pelabuhan dan terminal serta sarana dan prasarana perhubungan.
4. Terjadinya peningkatan pelayanan angkutan kepada masyarakat,
5. Pembangunan Halte Bus, Terminal Cargo, Terminal Penumpang Pembantu, Pelabuhan Tenayan, Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kantor Dishub,
6. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan pagar pengaman jalan,
7. Penyebarluasan Informasi kepada operator seluler dan jasa titipan,
8. Tersedianya menara telekomunikasi yang dimanfaatkan secara bersama dengan tatanan yang teratur dalam ruang wilayah kota.

C. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dimana Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai Tugas pokok, yaitu melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota bidang Perhubungan. Berikut ini dapat dilihat struktur

organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru beserta tugasnya masing-masing yaitu;

1. Kepala Dinas mempunyai tugas;

- a. Menyusun rencana kegiatan Dinas Perhubungan sesuai ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengkoordinasi Sekretaris, Kepala Bidang dan KepalaUPT agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya
- e. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
- f. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis bidang perhubungan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang kebijakan yang perlu diambil dalam bidang perhubungan sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, dan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

2. Sekretaris mempunyai tugas;

- a. Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan Dinas Perhubungan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengkoordinasi para Kepala Sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- e. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier,
- f. Membuat telahan staf terhadap berbagai permasalahan kesekretariatan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengevaluasi kegiatan kesekretariatan, baik pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan tugas-tugas umum lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan dalam urusan kerumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan tata usaha keuangan dan kepegawaian serta tugas-tugas umum lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. Melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan disiplin pegawai, sesuai ketentuan yang berlaku;

- j. Melaksanakan koordinasi dengan para Kepala Bidang, Kepala UPT dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, dan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

3. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas ;

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. Melaksanakan koordinasi antar sub bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. Melaksanakan inventarisasi dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melaksanakan pengelolaan barang, kerumah tanggan dan perlengkapan serta urusan umum lainnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melaksanakan kegiatan kerumah tanggaan dan perlengkapan, pengelolaan barang, urusan surat-menyurat dan kearsipan serta melakukan tugas-tugas

keprotokolan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. Melaksanakan pencatatan, penyimpanan, pengelolaan, pendistribusian dan perawatan barang-barang atau asset-aset milik daerah di lingkungan dinas serta menyiapkan bahan usulan barang-barang milik daerah yang ada di lingkungan dinas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Melaksanakan penataan, keamanan dan penertiban lingkungan kantor agar tercipta suasana lingkungan yang nyaman dan terkendali;
- j. Melaksanakan tugas kedinas lainnya yang diberikan oleh atas; dan
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan Mempunyai Tugas;

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. Melaksanakan koordiansi antar sub bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. Menyusun rencana anggaran pelaksanaan kegiatan dinas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. Melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dinas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengkompilasi pertanggung jawaban penggunaan anggaran dari masing-masing bidang sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Narasumber

Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut tentang Evaluasi Kinerja Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan Dalam Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas (Traffic Light) Di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, terlebih dahulu penulis akan menjabarkan secara rinci identitas Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini, adapun identitas tersebut akan diklasifikasikan menurut umur, pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel V.1 Klasifikasi Narasumber Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1.	25-35	1	11%
2.	36-46	6	67%
3.	47-57	2	22%
	Jumlah	9	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2018

Berdasarkan pada table diatas, dapat diketahui bahwa narasumber dengan usia antara 25-35 tahun berjumlah 1 orang dengan presentase 11%, narasumber dengan usia antara 36-46 tahun berjumlah 6 orang dengan presentase 67%, dan

narasumber dengan usia antara 47-57 tahun berjumlah 2 orang dengan presentase 22%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa, narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan narasumber yang berada pada usia yang Cukup matang , baik dalam mengambil keputusan ataupun kematangan dari pola pikirnya, serta dinilai lebih berpengalaman didalam pekerjaannya, yaitu narasumber yang berada pada usia antara 36-46 tahun dengan jumlah sebanyak 6 orang atau sama dengan 67% dari keseluruhan Narasumber.

Selanjutnya peneliti akan menggambarkan keadaan Narasumber diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikannya, yaitu sebagai berikut :

Tabel V.2 Klasifikasi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	SMA	1	11%
2.	S1	7	78%
3.	S2	1	11%
	Jumlah	9	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2018

Berdasarkan data pada table diatas, dapat diketahui bahwa narasumber dengan tingkat pendidikan SMA berjumlah 1 orang dengan persentase 11%, narasumber dengan tingkat pendidikan Sarjana (S1) berjumlah 7 orang dengan persentase 78%, narasumber tingkat pendidikan S2 berjumlah 1 orang dengan presentase 11%.

Tingkat Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan, baik dalam hal pengetahuan, wawasan, sikap, dan cara berfikir. Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa narasumber yang digunakan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang memiliki kualitas dan kemampuan, dilihat dari jumlah narasumber terbanyak yaitu dengan tingkat pendidikan sarjana.

Terakhir, klasifikasi narasumber dilihat dari jenis kelaminnya, yang akan dijelaskan pada tabel V.3 dibawah ini :

Tabel V.3 Klasifikasi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	Laki-laki	8	89%
2.	Perempuan	1	11%
	Jumlah	9	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa narasumber dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 8 orang dengan persentase 89%, sedangkan narasumber dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 1 orang dengan persentase 11%. Adapun pengaruh jenis kelamin adalah pada sikap dari masing-masing gender, dimana seorang laki-laki cenderung lebih cepat, tegas dan memiliki emosional yang tinggi dibandingkan dengan perempuan.

B. Hasil Penelitian Evaluasi Kinerja Seksi Rekayasa Dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Dan Perairan Dalam Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas (*Traffic Light*) Di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Menurut Nurcholis (2005:169) evaluasi merupakan suatu proses yang mendasar diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

proses perawatan ada pada kendali Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan seluruh proses Pemeliharaan dan Perawatan di atur berdasarkan Peraturan Daerah kota Pekanbaru No. 02 tahun 2009. Didalam Peraturan Daerah kota Pekanbaru paragraf 3 (tiga) yaitu penyelenggaraan alat pemberi isyarat lalu lintas pasal 191 yang berbunyi “Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Dari bunyi peraturan daerah kota Pekanbaru No. 2 tahun 2009 dan juga berdasarkan bunyi visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu melakukan perencanaan pengawasan dan juga pemeliharaan serta berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat”.

Berhubungan dengan permasalahan di atas dan juga di dukung dengan fakta-fakta dilapangan yang menggambarkan bahwa masih kurang maksimalnya kinerja Seksi Rekayasa dan Fasilitas dalam menangani Pemeliharaan dan juga

melakukan Perawatan terhadap Rambu Lalu Lintas (*Traffic Light*) di Kota Pekanbaru.

Untuk melihat bagaimana, Evaluasi Kinerja Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan Dalam Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas (*Traffic Light*) Di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, peneliti menggunakan Kriteria Evaluasi Menurut William N. Dunn (2003:610) dimana Evaluasi Kinerja dipengaruhi oleh 6 (enam) faktor berikut :

1. Efektifitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Menurut N Dunn bahwa efektifitas berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya”(N. Dunn, 2003:429).

Ditinjau dari segi pengertian efektivitas diatas, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauh mana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dalam perkembangan.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu Bapak Aripin HR.SH, beliau mengatakan :

“ Di dalam Pembentukan Tim Kerja di Dinas Perhubungan ini terdapat bidang pemeliharaan dan perawatan Traffic Light, bidang tersebut termasuk ke dalam Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, yang membawahi pertama; Seksi manajemen dan kebutuhan lalu lintas jalan dan perairan, kedua seksi rekayasa dan fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan, ketiga seksi Pengawasan Lalu Lintas Jalan, yang mempunyai tugas yaitu salah satunya mengenai Pemeliharaan dan Perawatan Traffic Light di Kota Pekanbaru”.

Dilanjutkan Oleh Bapak Aripin HR.SH, Beliau mengatakan :

“ Didalam Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Personil menurut saya sudah cukup Efektif, karena setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti Kepada Narasumber Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yaitu Bapak Saiful Alades SH, Beliau Mengatakan :

“Tugas-tugas atau fungsi dari Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan yaitu salah satunya Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan traffic Light, Rambu Jalan, RPPJ, kanstin, Marka Jalan, Papan Nama Jalan, Alat Pengendali dan Pengamanan Pemakai Jalan serta Fasilitas Pendukung dan Perlengkapan Jalan dan Perairan.”.

Di Lnjutkan Oleh Bapak Saiful, beliau mengatakan :

“ Kalau mengenai Pembinaan dan Penyuluhan terhadap personil itu dilakukan oleh masing-masing seksi. nah, kalau mengenai Pemeliharaan dan Perawatan Traffic Light itu yang mengkoordinasi yaitu Seksi Rekaya dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan, dan juga menurut saya sudah cukup efektif di dalam melakukan pembinaan dan penyuluhan tersebut”.

Berdasarkan Hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Personil maupun Pembentukan Tim Kerja di Bidang

Pemeliharaan dan Perawatan Traffic Light di Kota Pekanbaru Sudah Cukup Efektiv atau sudah terlaksana dengan baik.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Zulfahmi, S.T selaku Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan, Beliau Mengatakan :

“ Tugas-Tugas yang dilakukan ataupun Penyuluhan terhadap personil sudah dilakukan akan tetapi masih terdapat hambatan-hambatan yaitu salah satunya kurang tersedianya Fasilitas Perlengkapan jalan di kota pekanbaru seperti marka, rambu, RPPJ dan Paku Jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dan maraknya aksi pencurian dan perusakan/validalism”.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan di atas dapat diketahui bahwa Pembentukan Tim Kerja maupun Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Personil Sudah Dilakukan dengan Baik, akan tetapi masih terdapat Hambatan-Hambatan di lapangan seperti kurang tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kota Pekanbaru ini, Maka dapat dikatakan masih Kurang Efektif.

Dan berdasarkan hasil wawancara kepada Masyarakat Pengguna Jalan Di Kota Pekanbaru, mereka mengatakan :

“ setau saya memang masih banyak mas rambu lalu lintas yang mati, salah satunya di Jalan Panam/ Garuda Sakti itu mati mas jadi Kalau Pagi jika masyarakat berangkat kerja atau mengantar anak sekolah itu pasti selalu macet, dan setiap Sore jika orang pulang kerja pasti macet juga mas, dan masih banyak lagi mas di tempat lain rambu lalu lintas jalan yang mati, jadi ya mau tidak mau kita harus dihadapkan dengan kemacetan mas setiap harinya. “

Berdasarkan hasil observasi dilapangan diatas, dapat diketahui bahwa masih banyak rambu lalu lintas yang mati, salah satu rambu lalu lintas yang mati

berada di jalan Panam, Garuda Sakti, dan masih banyak lagi yang lainnya, yang mengakibatkan arus lalu lintas menjadi macet disetiap saat jam kerja maupun disaat jam pulang kerja. Hal ini menjadi perhatian khusus kepada dinas perhubungan untuk mengatasi kemacetan disetiap persimpangan jalan yang rambu lalu lintas atau Traffic Light yang mati.

Berdasarkan hasil Observasi Diatas Mengenai Indikator Efektivitas dapat di ketahui bahwa didalam Pembentukan Tim Kerja maupun Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan Personil Sudah Efektif, akan tetapi masih ditemui kekurangan seperti kurangnya ketersediaan anggaran sehingga masih banyak Rambu-rambu lalu lintas yang mati sehingga terjadinya kemacetan di persimpangan jalan disetiap harinya. Maka berdasarkan hasil observasi tersebut dapat dikategorikan “Cukup Terlaksana”.

2. Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.

Menurut N. Dunn, efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos

moneter,efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien (N. Dunn, 2003:430).

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu Bapak Aripin HR.SH, mengenai indikator Efisiensi beliau mengatakan :

“ Penyusunan Program Kerja itu ada di setiap tahunnya seperti :mengoperasikan angkutan umum massal yang aman, nyaman dan terjangkau, mengendalikan kemacetan lalu lintas yaitu dengan melengkapi fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan sebagainya, meningkatkan sarana dan prasarana dan fasilitas perhubungan dan juga mengirimkan aparat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk mengikuti beberapa diklat baik teknis maupun non teknis”.

Dilanjutkan Oleh Bapak Aripin mengenai sub indikator yang kedua, beliau mengatakan :

“ Keterbatasan anggaran adalah faktor yang mempengaruhi di dalam rencana kerja, dimana anggaran yang tersedia ini belum mencukupi untuk memperbaiki rambu lalu lintas, marka jalan dan sebagainya, akibatnya masih banyak rambu lalu lintas di persimpangan kota pekanbaru tersebut yang dalam keadaan mati, sehingga menimbulkan kemacetan setiap harinya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa mengenai program kerja sudah dilaksanakan atau sudah ada, akan tetapi yang menjadi permasalahan yaitu mengenai anggaran yang kurang memadai sehingga masih banyak rambu lalu lintas yang mati, sehingga terjadinya kemacetan di setiap persimpangan yang pada kendaraan bermotor.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti Kepada Narasumber Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yaitu Bapak Saiful Alades SH, Beliau Mengatakan :

“ penyusunan program kerja sudah ada disetiap tahunnya, dan yang menjadi permasalahan atau kendala-kendala di dalam pemeliharaan dan pengawasan rambu lalu lintas yaitu masalah anggaran yang belum memadai, sehingga masih banyak rambu lalu lintas (traffic light) yang rusak atau mati.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa program kerja sudah ada disetiap tahunnya seperti Program kerja dalam mengoperasikan angkutan umum masal yang aman, nyaman dan terjangkau, mengendalikan kemacetan lalu lintas yaitu dengan melengkapi fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan sebagainya, meningkatkan sarana dan prasarana dan fasilitas perhubungan dan juga mengirimkan aparat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk mengikuti beberapa diklat baik teknis maupun non teknis.

Jawaban senada juga di sampaikan oleh Bapak Zulfahmi, ST selaku Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan kepada Peneliti, Beliau Mengatakan :

“Masalah atau kendala-kendala yang dihadapi saat ini adalah masalah keterbatasan anggaran, anggaran itu sudah ada akan tetapi masih belum tercukupi untuk menangani rambu lalu lintas, marka jalan dan sebagainya, dan juga bila memperbaiki Traffic Light perlu bongkar kabel bawah tanah tapi untuk itu butuh Dana besar yang tak dapat tercover APBD.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa kendala-kendala yang dihadapi yaitu masalah keterbatasan anggaran, anggaran setiap tahunnya sudah disediakan, akan tetapi masih belum mencukupi untuk menangani atau masalah rambu lalu lintas (Traffic Light) yang rusak ataupun mati.

Berdasarkan hasil Observasi diatas, masalah yang saat ini dihadapi yaitu masalah anggaran, Penyusunan Program kerja itu sudah ada, akan tetapi masalah anggaran inilah yang masih menjadi permasalahan, sehingga berdampak pada Rambu Lalu Lintas yang Mati, sehingga terjadinya kemacetan di setiap persimpangan jalan yang ada pada kendaraan bermotor. Maka dapat disimpulkan dari observasi pada indikator kedua yaitu masalah efisiensi dapat di Kategorikan “Cukup Baik”.

3. Kecukupan

Kecukupan yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (N. Dunn, 2003;430).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu Bapak Aripin HR.SH, mengenai indikator Kecukupan beliau mengatakan :

“ Seksi Pengawasan Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas membantu kepala bidang manajemen, dan rekayasa lalu lintas dalam melaksanakan sub urusan pengawasan lalu lintas jalan, dan kami telah melakukan pengawasan terhadap rambu lalu lintas di persimpangan jalan yaitu dengan pelaksanaan pengawasan penertiban, pengendalian dan pengamanan lalu lintas di ruas-ruas jalan persimpangan jalan dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota.”

Selanjutnya beliau mengatakan :

“mengenai Pelaksanaan perawatan rambu lalu lintas ini sudah dilakukan, akan tetapi Karena keterbatasan anggaran maka perawatan tersebut kurang maksimal, sehingga banyak rambu lalu lintas yang rusak dan juga maraknya aksi pencurian dan perusakan terhadap rambu lalu lintas tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Pengawasan terhadap rambu lalu lintas (Traffic Light) yang rusak atau mati sudah dilakukan pengawasan, seperti adanya personil kerja yang turun ke ruas persimpangan jalan untuk mengawasi atau memantau masyarakat tersebut agar tidak terjadi kekacauan di persimpangan jalan tersebut, akan tetapi mengenai pelaksanaan perawatan ini belum cukup maksimal dikarenakan anggaran yang belum memadai.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti Kepada Narasumber Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yaitu Bapak Saiful Alades SH, Beliau Mengatakan :

“Kecukupan Personil didalam melakukan pengawasan sudah tercukupi, seperti diturunkannya personil untuk mengawasi masyarakat di persimpangan jalan, akan tetapi kecukupan di dalam perawatan rambu lalu lintas belum terpenuhi sehingga berdampak pada kemacetan di persimpangan jalan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa personil dalam melakukan pengawasan sudah tercukupi, akan tetapi berdasarkan observasi dilapangan masih kurangnya atau minimnya jumlah personil pengawas dilapangan yaitu hanya satu orang saja yang melakukan pengawasan rambu lalu lintas

(Traffic Light), maka dari itu akibat kurangnya personil dilapangan, mengakibatkan berdampaknya pada kemacetan di persimpangan jalan.

Jawaban senada juga disampaikan oleh Bapak Rudi Martono S.Kom selaku Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan, Beliau Mengatakan :

“Pelaksanaan Perawatan sudah kami lakukan dan pelaksanaan pengawasan terhadap traffic light atau rambu lalu lintas sudah kami jalankan, akan tetapi mengenai rambu lalu lintas yang mati tersebut belum bisa kami atasi, dikarenakan masalah anggaran yang belum terpenuhi.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa Pengawasan sudah dilakukan, akan tetapi berdasarkan observasi dilapangan mengenai rambu-rambu lalu lintas yang rusak ataupun mati belum bisa diatasi dikarenakan minimnya anggaran yang tersedia.

Dilanjutkan oleh Bapak Zulfahmi, ST, beliau mengatakan :

“Adapun Rutinitas Pengecekan berkala sebulan sekali, sementara untuk mengecek Timer dilakukan sekali dalam tiga hari.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa pengecekan traffic light dilakukan sebulan sekali dan pengecekan timer dilakukan sekali dalam tiga hari, akan tetapi berdasarkan observasi dilapangan, masih belum ada personil yang turun kelapangan untuk melakukan pengecekan rambu lalu lintas (Traffic Light) yang mati, sehingga sampai saat ini rambu-rambu lalu lintas yang rusak ataupun mati masih belum diperbaiki ataupun diganti dengan yang baru.

Berdasarkan hasil Observasi mengenai indikator Kecukupan dapat dinilai “Cukup Baik”, dikarenakan berdasarkan observasi dilapangan masih belum tercukupinya masalah perbaikan atau perawatan terhadap rambu lalu lintas yang rusak atau pun mati, seingga terjadinya kemacetan di persimpangan jalan, dan juga personil dilapangan dalam melakukan pengawasan belum tercukupi, yaitu hanya satu orang saja yang melakukan pengawasan rambu-rambu lalu lintas (Traffic Light).

4. Pemerataan

Menurut N. Dunn (2003;434) menyatakan bahwa kriteria kesamaan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu Bapak Aripin HR.SH, mengenai indikator Pemerataan beliau mengatakan :

“Mengenai Pemerataan Traffic Light sudah maksimal, di setiap persimpangan jalan tentunya kami pasang rambu lalu lintas, dan kalau masalah penggantian unit rambu lalu lintas yang mati itu pasti kedepannya akan kami ganti, akan tetapi akan melalui proses dulu .”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Pemerataan Traffic Light sudah Cukup maksimal, karena disetiap persimpangan jalan terdapat Rambu Lalu Lintas (Traffic Light).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti Kepada Narasumber Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yaitu Bapak Saiful Alades SH, Beliau Mengatakan :

“Mengenai Penggantian unit Rambu Lalu Lintas (Taffic Light) tentunya kami akan mengganti setiap unit traffic Light yang mati, akan tetapi sebagian besar masih terdapat aksi-aksi yang tidak terpuji yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat yang berakibat rusaknya atau hilangnya fasilitas kelengkapan jalan, seperti rambu-rambu lalu lintas maupun Traffic Light. Sehingga berpengaruh terhadap ke amanan dan kenyamanan di jalan.”

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat diketahui bahwa masih terdapat aksi-aksi yang tidak terpuji yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat, yaitu dengan mencuri ataupun merusak rambu lalu lintas (Traffic Light).

Jawaban senada juga disampaikan oleh Bapak Zulfahmi, ST selaku Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan Kepada Peneliti, Beliau Mengatakan :

“Perawatan dan Pemeliharaan Traffic Light jika ada yang rusak atau diganti itu tidak bisa langsung diganti, harus menunggu dulu dari Jakarta dan memakan waktu yang cukup lama.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa perawatan dan pemeliharaan Traffic Light yang rusak ataupun mati tidak bisa langsung diganti dan harus menunggu dulu dari Jakarta dan memakan waktu yang cukup lama, dan berdasarkan observasi dilapangan, diketahui bahwa masih banyak rambu-rambu lalu lintas yang rusak ataupun mati yang sampai saat ini belum diperbaiki atau

diganti, sehingga sampai saat ini dipersimpangan jalan Panam, Garuda Sakti Jl Riau dan lain sebagainya mengalami masalah kemacetan disetiap harinya.

Dan berdasarkan hasil wawancara kepada Masyarakat Pengguna Jalan Di Kota Pekanbaru, mereka mengatakan :

“Kalau Rambu Lalu lintas di setiap persimpangan jalan besar pasti ada mas, Cuma kadang ada yang mati, ya kami sebagai masyarakat tentunya sangat berharap kepada pemerintah daerah khususnya dinas perhubungan Kota Pekanbaru untuk segera mengganti atau memperbaiki rambu lalu lintas ini lah mas, soalnya sering macet kalau lampu merah nya mati, terutama menjelang hari libur dan juga pada hari kerja.”

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat diketahui bahwa masyarakat sangat berharap agar pemerintah khususnya dinas perhubungan Kota Pekanbaru untuk segera mengganti rambu lalu lintas (Traffic Light) yang rusak ataupun mati, sehingga tidak lagi menimbulkan kemacetan di persimpangan jalan dan juga masyarakat berharap agar Kinerja Dinas perhubungan Kota Pekanbaru lebih ditingkatkan lagi agar dapat berjalan dengan maksimal, dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan hasil Observasi dilapangan mengenai indikator pemerataan maka dapat diketahui bahwa Pemerataan Rambu Lalu Lintas (Traffic Light) Sudah Cukup Maksimal, di setiap persimpangan jalan terdapat Rambu Lalu Lintas, dan masyarakat pun sudah merasakan adanya rambu lalu lintas di persimpangan jalan, Akan Tetapi masih banyak yang Rusak ataupun mati sehingga terjadinya kemacetan, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berupaya mengganti Traffic Light yang mati, akan tetapi masalah kendala anggaran dan juga Masalah penggantian rambu lalu lintas yang tidak bisa langsung diganti yang diakibatkan

dari pemesanan rambu lalu lintas yang prosesnya cukup lama. Dan juga kurangnya kinerja yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang mengakibatkan lambannya proses penanganan Traffic Light yang rusak ataupun mati, berdasarkan hasil observasi lapangan mengenai indikator pemerataan Maka dapat di kategorikan “Cukup Baik”.

5. Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (N. Dunn, 2003;437).

Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negative berupa penolakan.

Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan (N. Dunn, 2003;437).

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu Bapak Aripin HR.SH, mengenai indikator Kecukupan beliau mengatakan :

“ Kami disini tentunya akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus, dan berkesinambungan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kota disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan, serta selalu berkoordinasi dengan dinas – instansi terkait dalam mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan aspirasi masyarakat serta aspirasi pemerintah kota pekanbaru, ini sesuai dengan visi dan misi dinas perhubungan.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan juga selalu berkoordinasi dengan dinas-instansi terkait dalam mempertemukan kebutuhan masyarakat dan juga selalu memberikan peluang untuk aspirasi masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti Kepada Narasumber Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yaitu Bapak Saiful Alades SH, Beliau Mengatakan :

“Kami tentunya memberikan respon yang cepat mengenai kerusakan Traffic Light yang rusak, akan tetapi masalah mengganti traffic light itu tidak bisa langsung didatangkan yang baru, dan kami menggunakan pihak ketiga dan harus menunggu barang datang dari pusat, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama.”

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memberikan respon yang cepat mengenai traffic light yang rusak ataupun mati, akan tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan rambu lalu lintas (traffic light) yang mati.

Jawaban senada juga disampaikan oleh Bapak Zulfahmi, ST selaku Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan Kepada Peneliti, Beliau Mengatakan :

“ Kami selalu menyediakan tempat pengaduan bagi masyarakat yang ingin mengajukan aspirasi dan keluhan-keluhan mereka, dan masalah yang sedang dihadapi masyarakat saat ini ya salah satunya tentang kemacetan yang diakibatkan oleh rambu lalu lintas (Traffic Light) yang sebagian rusak atau mati di persimpangan jalan.”

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat diketahui bahwa dinas perhubungan kota Pekanbaru memberikan peluang atau kesempatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, akan tetapi masalah yang saat ini terjadi adalah masalah kemacetan yang diakibatkan oleh rambu lalu lintas (Traffic Light) yang mati, sehingga berdampak pada kemacetan di setiap jam kerja ataupun hari libur.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pengguna jalan di kota Pekanbaru, mereka mengatakan :

“ ya kalau masalah penyediaan tempat pengaduan bagi masyarakat itu ada, akan tetapi ya belum bisa menanggulangi masalah kemacetan ini, tepatnya di persimpangan rambu lalu lintas yang mati, maka dari itu kami sebagai masyarakat sangat berharap kepada dinas perhubungan untuk cepat mengganti uni-unit traffic light yang mati, agar tingkat kemacetan bisa teratasi.”

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, maka dapat diketahui bahwa sudah tersedianya tempat pengaduan bagi masyarakat yang ingin mengajukan aspirasi mengenai rambu lalu lintas (Traffic Light), akan tetapi kurangnya kepedulian masyarakat dalam mengajukan aspirasi dan keluh kesahnya tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru “Cukup Baik” terhadap laporan kerusakan traffic light dan juga Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

menyediakan tempat pengaduan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan-keluhannya, akan tetapi masalah penggantian traffic light yang mati belum bisa cepat teratasi dikarenakan masalah anggaran dan juga masalah waktu untuk mengganti traffic light tersebut memerlukan waktu yang cukup lama. Maka dari itu berdasarkan hasil observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa pada indikator Responsivitas dapat dikategorikan “Cukup Baik”.

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (appropriateness) adalah :

“kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternative untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternative yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substansif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrument untuk merealisasikan tujuan tersebut, (N. Dunn;2003;499).

Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu memprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negative atau dimungkinkan alternative lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu Bapak Aripin HR.SH, mengenai indikator Ketepatan beliau mengatakan :

“Kelengkapan sarana dan prasarana sudah cukup memadai seperti angkutan umum yang menjadi pengurang kemacetan, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, marka parker, rekayasa lalu lintas, penertiban parker liar dan sebagainya.”

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana angkutan umum seperti Bus way dan lain sebagainya sudah cukup memadai dalam menanggulangi kemacetan, akan tetapi masih banyak masyarakat yang lebih memilih memakai mobil pribadi dan juga motor yang mengakibatkan semakin macetnya disetiap persimpangan jalan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti Kepada Narasumber Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yaitu Bapak Saiful Alades SH, Beliau Mengatakan :

“ Kami telah menyediakan sarana dan prasarana Fasilitas perhubungan seperti salah satunya mengenai Traffic Light di setiap persimpangan jalan, dan juga pengelolaan dan pengendalian lalu lintas dengan menggunakan optimasi penggunaan prasarana yang ada.”

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, dapat ketahu bahwa pemasangan rambu lalu lintas (Traffic Light) di persimpangan jalan sudah tersedia, akan tetapi ada beberapa rambu lalu lintas yang rusak ataupun mati yang sampai saat ini belum ada penanganan dari dinas perhubungan tersebut.

disampaikan oleh Bapak Zulfahmi, ST selaku Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan, Beliau Mengatakan :

“ Kami selalu melakukan pengawasan di lapangan terkait pengurang kemacetan, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, marka parkir, rekayasa lalu lintas, penertiban parker liar dan sebagainya.”

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, dapat diketahui bahwa dinas perhubungan kota pekanbaru khususnya seksi rekayasa dan fasilitas lalu lintas jalan dan perairan sudah melakukan pengawasan mengenai traffic light yang rusak ataupun mati, akan tetapi minimnya jumlah personil yang ada yang mengakibatkan kurang maksimalnya dan juga kurang efektifnya pengawasan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan mengenai indikator Ketepatan maka dapat di kategorikan “Cukup Baik”. Di karenakan kelengkapan sarana dan prasarana yang cukup memadai, dan juga personil pengawas dilapangan untuk memantau keadaan jalan di Kota Pekanbaru ini sudah ada akan tetapi permasalahan yang terjadi saat ini adalah minimnya jumlah personil pengawas dilapangan sehingga tidak maksimalnya pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan oleh seksi rekayasa dan fasilitas lalu lintas jalan dan perairan terhadap rambu lalu lintas yang mana sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009.

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari indikator dan sub-sub indikator diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa, Evaluasi Kinerja Seksi

Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan Dalam Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas (Traffic Light) di Dinas perhubungan Kota Pekanbaru dapat dinilai "Cukup Baik". Akan tetapi masih ditemui faktor penghambat yang ditemui yaitu masalah Traffic Light yang Rusak atau mati Penggantiannya memerlukan waktu yang cukup lama, dan harus menunggu dari Pusat untuk mengganti Traffic Light yang baru, juga dikarenakan Traffic Light yang mati akan menimbulkan kemacetan di setiap persimpangan jalan seperti di hari kerja dan di hari libur, dan juga kurang maksimalnya Pemeliharaan dan Perawatan yang dilakukan Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas mengenai perawatan dan pemeliharaan traffic Light.

C. Hasil Penelitian Dalam Wawancara Mengenai Evaluasi Kinerja Seksi Rekayasa Dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan Dalam Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas (Traffic Light) Di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

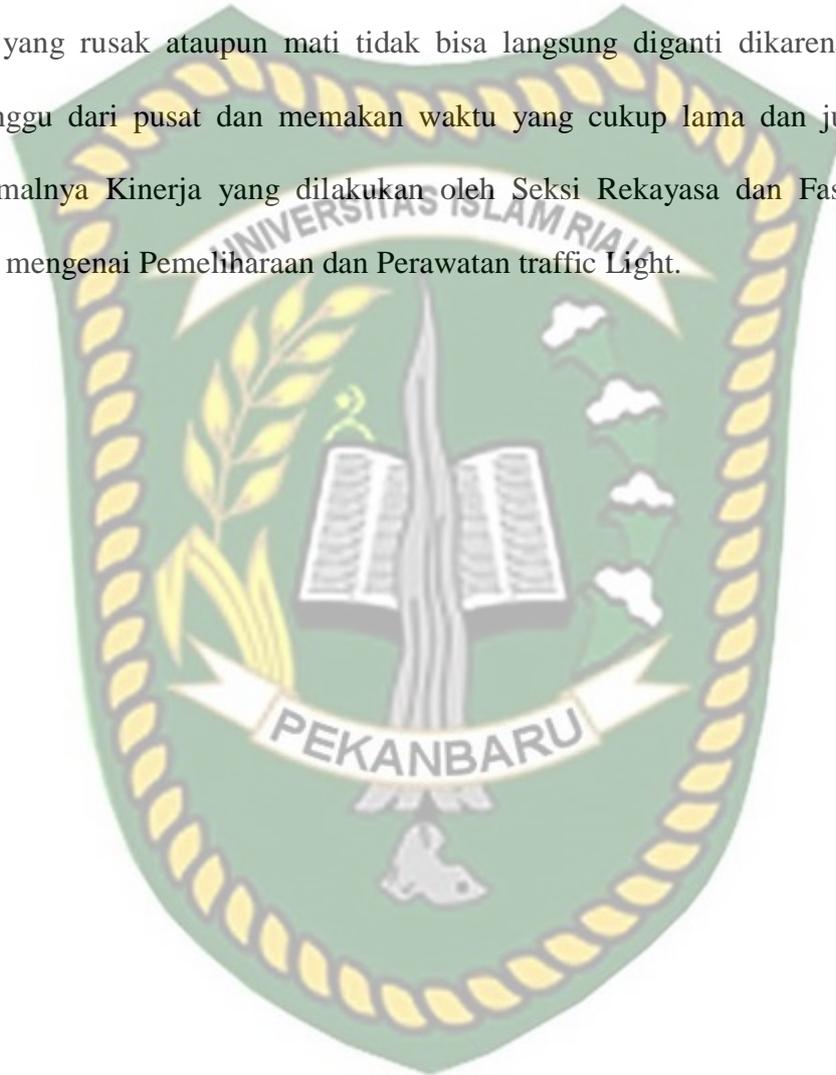
Berdasarkan Evaluasi Kinerja Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan Dalam Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas (Traffic Light) di Dinas perhubungan Kota Pekanbaru dapat dinilai "Cukup Baik". Akan tetapi masih ditemui faktor penghambat yang ditemui di setiap indikator yaitu :

1. Efektivitas, berdasarkan indikator efektivitas masih ditemui faktor penghambat yakni kurangnya ketersediaan anggaran, sehingga masih banyak Rambu-rambu lalu lintas yang mati sehingga terjadinya kemacetan di persimpangan jalan disetiap harinya.

2. Efisiensi, berdasarkan indikator Efisiensi masih ditemui juga faktor penghambat yakni masalah Anggaran, Program kerja sudah ada akan tetapi masalah anggaran inilah yang berdampak pada Rambu Lalu lintas (traffic Light)
3. Kecukupan, berdasarkan indikator kecukupan dapat dinilai cukup baik, karena masih ditemui faktor penghambat yakni masih belum tercukupinya masalah perbaikan atau perawatan terhadap rambu lalu lintas yang rusak ataupun mati.
4. Pemerataan, berdasarkan indikator Pemerataan dapat dinilai Cukup Baik, akan tetapi masalah Penggantian Rambu Lalu lintas yang tidak bisa langsung diganti yang diakibatkan dari pemesanan rambu lalu lintas yang prosesnya cukup lama.
5. Responsivitas, berdasarkan indikator Responsivitas dapat dinilai Cukup baik, akan tetapi masalah anggaran dan juga masalah waktu untuk mengganti rambu lalu lintas yang mati memerlukan waktu yang cukup lama.
6. Ketepatan, berdasarkan indikator ketepatan dapat dinilai Cukup Baik, Di karenakan kelengkapan sarana dan prasarana yang cukup memadai, dan juga personil pengawas dilapangan untuk memantau keadaan jalan di Kota Pekanbaru ini sudah ada akan tetapi permasalahan yang terjadi saat ini adalah minimnya jumlah personil pengawas dilapangan sehingga tidak maksimalnya pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan oleh seksi rekayasa dan fasilitas lalu lintas jalan dan perairan terhadap rambu lalu lintas yang mana sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009.

B. Kendala-Kendala yang ditemui di lapangan :

Kurangnya anggaran untuk mengganti Traffic Light yang Rusak atau pun mati sehingga menimbulkan kemacetan dipersimpangan jalan, jika ada Traffic Light yang rusak ataupun mati tidak bisa langsung diganti dikarenakan harus menunggu dari pusat dan memakan waktu yang cukup lama dan juga kurang maksimalnya Kinerja yang dilakukan oleh Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas mengenai Pemeliharaan dan Perawatan traffic Light.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1). Hasil Penelitian mengenai Evaluasi Kinerja Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan Dalam Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas (Traffic Light) Di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat dikatakan “Cukup Baik”. Hal ini terlihat dari kinerja seksi rekayasa dan fasilitas lalu lintas jalan dan perairan dalam pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan rambu lalu lintas (Traffic Light) didinas Perhubungan kota pekanbaru telah melakukan tugasnya, namun belum maksimal, akibat belum maksimalnya pemeliharaan dan perawatan rambu lalu lintas tersebut masih banyaknya rambu-rambu lalu lintas (Traffic Light) yang rusak ataupun mati dan mengakibatkan terjadinya kemacetan di setiap persimpangan jalan.
- 2). Kendala-Kendala yang ditemui dilapangan yaitu :
 - a. Kurangnya anggaran untuk mengganti Traffic Light yang Rusak atau pun mati, sehingga banyak rambu lalu lintas yang dalam keadaan rusak ataupun mati yaitu sekitar 11 titik yang ada di Kota Pekanbaru tersebut.
 - b. Adanya aksi-aksi masyarakat yang tidak terpuji yang mengakibatkan rusaknya atau hilangnya rambu lalu lintas tersebut.

- c. Jika ada Traffic Light yang rusak ataupun mati tidak bisa langsung diganti dikarenakan harus menunggu dari pusat dan memakan waktu yang cukup lama.
- d. Dikarenakan Traffic Light yang rusak ataupun mati maka pengguna jalan menjadi berdampak pada kemacetan yang cukup panjang dipersimpangan jalan.
- e. kurang maksimalnya Kinerja yang dilakukan oleh Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas mengenai Pemeliharaan dan Perawatan traffic Light.
- f. minimnya jumlah personil pengawas dilapangan sehingga tidak maksimalnya pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan oleh seksi rekayasa dan fasilitas lalu lintas jalan dan perairan terhadap rambu lalu lintas yang mana sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan pembahasan mengenai “Evaluasi Kinerja Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan Dalam Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas (Traffic Light) Di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru”, maka Peneliti mencoba melakukan beberapa saran yaitu :

1. Seharusnya Pengawasan pemeliharaan dan pengecekan Traffic Light di lakukan secara rutin guna mengantisipasi terjadinya kerusakan pada sistem operasi traffic light tersebut.

2. Seharusnya Dinas perhubungan cepat tanggap dalam memberikan respon terkait dengan kerusakan traffic light agar tidak meresahkan masyarakat pengguna jalan dan juga agar tidak terjadi kemacetan di persimpangan jalan.
3. Seharusnya Kinerja Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Dan Perairan Kota Pekanbaru khususnya dalam menangani Traffic Light yang mati harus di tingkatkan lagi, agar semuanya bisa berjalan dengan maksimal.
4. Seharusnya masyarakat berperan aktif dalam melakukan pengawasan pada traffic light dengan memberikan masukan dan meliputi ataupun kotak saran kepada dinas yang bersangkutan melalui media massa maupun media cetak dan lain sebagainya.
5. Dalam melakukan Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas (Traffic Light) di dinas perhubungan Kota Pekanbaru, hendaknya melakukan penilaian dan evaluasi rutin terhadap pengawasan yang dilakukan.
6. Seharusnya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menambah personil pengawas dilapangan untuk memantau rambu lalu lintas yang rusak ataupun mati, sehingga agar pengawasan tersebut dapat berjalan dengan efektif.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anwar Prabu Mangkunegara. 2005. *Sumber Daya Manusia perusahaan*. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Anwar Prabu Mangkunegara. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya,
- Achmad S. Ruky, 2004. *Sistem Manajemen Kinerja, Cetakan Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handoko, T. Hani. 1995. *Manajemen*. BPFE: Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia, cetakan ke-9*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta:PT. Bumi Aksara.
- Indrastuti, Sri 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*. Pekanbaru, UR Press.
- M. Manullang. 2002. *Dasar-dasar Manajemen. Cetakan 16*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Musanef, 2002, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Jilid Kedua, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Mustopadidjaja AR.,. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi,Implementasi Dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta: Duta Pertiwi Foundation
- Mangkunegara A.A, Anwar Prabu.2011, *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung :PT. Refika Aditama.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineke Cipta
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rineka Cipta
- Nurcholis, Hanif. 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- R. Terry George. 2003. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: PT.Bumi Aksara

- Rasyid, Ryaas. 2007. *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*. Jakarta : Yasrif Watampone.
- Santoso dan Tjiptono. 2004. *Evaluasi*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Samsudin, Sadili. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia: Bandung
- Sedarmayanti, 2003, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Penerbit Ilham Jaya.
- Sianipar, 2001. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta : LAN
- Siagian, P. Sondang. 2005. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Jakarta. Penerbit Bumi Aksara.
- Siagian, P. Sondang P. 2002. *Kepemimpinan Organisasi & Perilaku Administrasi*, Jakarta: Penerbit Gunung Agung
- Siagian, P. Sondang. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Siagian, P. Sondang P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia , Edisi I, Cetakan ketiga belas*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono.2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono.2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syafiie, Kencana, Inu, DR. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta. Jawa Barat
- Viethzal Rivai. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, cetakan pertama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta :Med Press
- Waluyo, 2007. *Manajemen Publik Konsep Aplikasi dan Implementasi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung : Mandar Maju
- Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen*, Pekanbaru, UIR Press.
- Zulkifli, 2009. *fungsi-fungsi manajemen*. Pekanbaru. UIR Press.

Dokumentasi :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kota Pekanbaru.

Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan.

Internet

(<http://wikipedia.indonesia.com.pekanbaru>)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau